

**ANALISIS PENENTUAN SPESIALISASI SEKTOR
EKONOMI DI KABUPATEN SLEMAN DALAM
MENGHADAPI IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH
PERIODE 1993-2001**

Skripsi



Disusun Oleh:

NUR KHOLIK

98.313.125

JURUSAN ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2003

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir (SKRIPSI) dengan judul :

ANALISIS PENENTUAN SPESIALISASI SEKTOR EKONOMI DI KABUPATEN SLEMAN DALAM MENGHADAPI IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH PERIODE 1993-2001

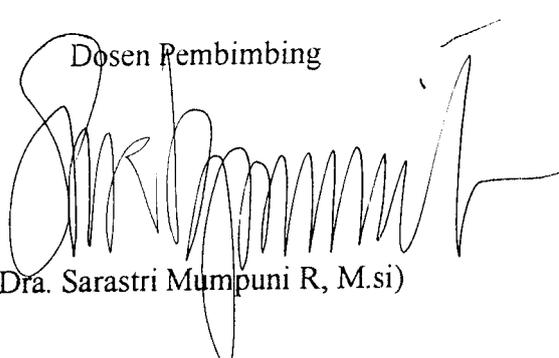
Disusun Oleh :

Nama : NUR KHOLIK

No. Mhs : 98.313.125

Telah disetujui dan disahkan di Jogjakarta, Oktober 2003

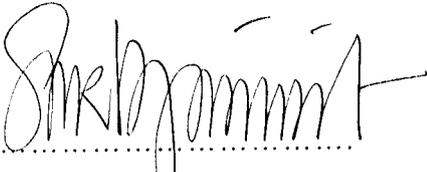
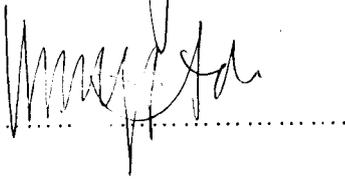
Dosen Pembimbing


(Dra. Sarastri Mumpuni R, M.si)

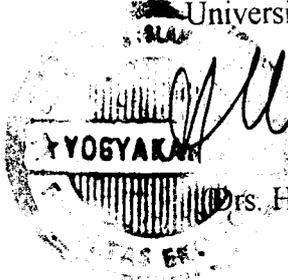
**ANALISIS PENENTUAN SPESIALISASI SEKTOR EKONOMI
DI KABUPATEN SLEMAN DALAM MENGHADAPI
IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH PERIODE 1993-2001**

Disusun oleh : NUR KHOLIK
Nomor mahasiswa : 98 313 125

Telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan LULUS
Pada tanggal, 10 November 2003

Pembimbing skripsi
Dra. Sarasri Mumpuni R, M.Si : 
Penguji I
Drs. Unggul Priyadi, M.Si : 
Penguji II
Drs. Achmad Tohirin, MA : 

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Drs. H. Suwarsono, MA)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Syukur Alhamdulillah Tugas Akhir ini dapat selesai dengan baik dan lancar. Tidak akan bisa kiranya aku bekerja dan menyusun sebuah karya kecil ini tanpa bantuan dan dukungan dari orang – orang yang mengerti, memahami dan menyayangi aku :

- ❖ **Bapak dan Ibu**, atas restunya maka aku punya semangat untuk menjalani hidup, dengan kasih sayang, aku dibesarkan dan di didik hingga bisa seperti hari ini dan, akan kucoba membahagikan mereka sebagai tanda baktiku padanya,
- ❖ **Kakak-kakakku dan adiku (Lely & Ary)** semua yang sudah mendukung aku, Terima Kasih buat dukungan dan do'anya",
- ❖ **Kekasihku Nety**, yang selalu hadir dalam doa, menjadi inspirasi dan motivasiku: "InsyaAllah Suatu hari nanti aku akan menjemputmu untuk bersama meraih impian",
- ❖ **Teman-teman "belajar"ku di EP'98** & teman – teman yang lain yang banyak membantu."Thanks buat masukan idenya",
- ❖ **Anak – anak kost "GALLERY 42" & Friends** : Denny, Agus, ,Wali, Oman, Gan–Gan, Een atas waktu dan obrolan obrolannya yang seru.....*keep funky guys!!* ,

- ❖ **Anak-anak Aliansi “Ngapak” di Jogja** : D'niel, Andi, Adhit, Sura, Fahmi, Avi, Azam, Arif. "piben kabare? aja klalen aku ya" !!
- ❖ Juga buat **teman-teman “seperjuangan”** yang tidak bisa kusebutkan di lembaran ini.

"Halaman persembahan ini tidak berarti untuk bisa membalas kebaikan kalian. Karya kecilku ini kucoba persembahkan bukan sebagai kebanggaanku atas kalian, tetapi hanya bingkisan kecil yang tak berarti sebagai hadiah atas perhatian dan bantuan kalian semua kepadaku selama ini".

وَالشُّكْرُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“ Dan mengapa mereka tidak mau memikirkan tentang (kejadian) diri mereka? Allah menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar”.

(QS. Ruum : 68)

“Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarahpun maka niscaya dia akan melihat (balasan) nya dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarahpun niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula”.

(QS. Al Zalzalah : 7 – 8)

“Hadapilah hidupmu dengan tegar dan kuat, niscaya hidupmu akan terasa ringan, jangan kau hadapi hidup dengan lemah karena hidupmu akan terasa berat”.

(KH . Abdullah Gymnastiar)

“Ilmu pengetahuan tanpa Agama bagai orang tuli yang tak mendengar, Agama tanpa ilmu bagai orang buta yang tak melihat”.

(Albert Einstein)

“The wise man is the man who can learn from his own mistakes and the other men, never give up to keep trying make a better day for tommorow”.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan Rahmat, Taufik dan Hidayah – Nya semata, akhirnya Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan lancar.

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu tugas dan persyaratan akademis dalam memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Indonesia Jogjakarta disamping juga sebagai sarana penerapan teori dan pengetahuan yang diperoleh selama di bangku kuliah.

Pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Suwarsono, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Dra. Sarastri Mumpuni R, M.si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian dan kesabaran mulai dari awal sampai akhir serta memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama kuliah.
4. Mas Iswanto yang telah dengan sabar memberikan pengarahan.

5. Ayahanda H. Maksudi dan Ibunda Hj. Toining dengan segala dan do”a restu, dan kasih sayang yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
6. Kakak-kakakku dan adikku (Lely & Ari) yang telah memberikan motifasi dan dorongan hingga selesainya skripsi ini.
7. Kekasihku (Nety) yang telah dengan sabar mengerti, dan memberikan motifasi bagi jalan hidupku.
8. Teman-teman EP 98 yang telah menjalin persahabatan (I Love You Guy”s).
9. Anak-anak kost Galery 42 yang memberiku tempat bernaung untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala bantuan dalam penyusunan tugas akhir ini.

“Tiada gading yang tak retak”, begitu pula dalam penyusunan Tugas Akhir ini, masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Saran dan kritik membangun selalu diharapkan untuk dapat menyempurnakan Laporan Tugas Akhir ini.

Penyusun mengharapkan Laporan Tugas Akhir ini dapat berguna khususnya bagi penulis dan juga bagi semua pihak yang berkepentingan dengan Laporan Tugas Akhir ini.

وَالشُّكْرُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالزَّكٰوةُ
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

Yogyakarta, Oktober 2003

Penyusun,

NUR KHOLIK

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN BERITA ACARA.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang	1
1.2. Perumusan masalah	16
1.3. Tujuan penelitian	16
1.4. Manfaat Penelitian	17
1.5. Metode Analisis Data	17
1.6. Metodologi Penelitian	23
1.7. Sistematikan Penulisan	25
BAB II. LANDASAN TEORI	
2.1. Pengertian Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi	27
2.1.1. Teori-teori Klasik	30
2.1.2. Teori Basis Ekonomi	31
2.1.3. Teori-teori Modern	33
2.2. Konsep Daerah	38
2.3. Teori Perencanaan Daerah	40
2.3.1. Pengertian Perencanaan	41

2.3.2. Ciri-ciri Perencanaan	42
2.3.3. Unsur-unsur pokok dalam Perencanaan Pembangunan	42
2.3.4. Fungsi Perencanaan	43
2.3.5. Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan	44
2.4. Model Perencanaan Pembangunan di Negara Sedang Berkembang	45
2.4.1. Kelemahan Perencanaan Pembangunan di Negara Sedang Berkembang	47
2.5. Perencanaan Pembangunan	47
2.6. Tehnik Analisis dalam Perencanaan Pembangunan	49
2.6.1. Tehnik Analisis <i>Shift Share</i> Klasik	50
2.6.2. Analisis <i>Location Quotient</i>	54

BAB III. KAJIAN PUSTAKA

3.1. Deskripsi	57
3.2. Tinjauan Penelitian Sebelumnya	57
3.2.1. Penelitian Pertama	57
3.2.2. Penelitian Kedua	59

BAB IV. KONDISI GEOGRAFIS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

4.1. Letak geografis	60
4.1.1. Pembagian Wilayah	60
4.1.2. Kondisi Kependudukan Kabupaten Sleman	65
4.2. Visi dan Misi Kabupaten Sleman	69
4.2.1. Visi Kabupaten Sleman	69
4.2.2. Misi Kabupaten Sleman	69
4.3. Kondisi Perekonomian Sleman	71

BAB V. ANALISA DATA	
5.1. Deskripsi Data	85
5.2. Kontribusi Kelompok Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta dan PDRB Kabupaten Sleman	86
5.3. Hasil Analisis <i>Shift Share</i>	88
5.4. Hasil Analisis <i>Location Quotien</i>	97
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Kesimpulan.....	103
6.2. Implikasi Kebijakan	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993-2001 Tahun Dasar 1993 (Jutaan Rupiah)	6
Tabel 1.2.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sleman Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993-2001 Tahun Dasar 1993 (Jutaan Rupiah)	7
Tabel 1.3.	Distribusi Persentase dan Tingkat Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan, Sektor Konstruksi, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Tahun 1994-1997	9
Tabel 1.4.	Distribusi Persentase dan Tingkat Pertumbuhan Sektor-sektor Unggulan Kabupaten Sleman Tahun 1994-1997	11
Tabel 1.5.	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Sleman 1993-1997	13
Tabel 1.6.	Perbandingan Sumbangan Sektor PDRB dengan Persentase Penduduk 10 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama	14
Tabel 1.7.	Kemungkinan-kemungkinan dari Pengaruh Alokasi	22
Tabel 4.1.	Pembagian Wilayah Menurut Kecamatan, Kelurahan, Luas Daerah, Kepadatan per km ² penduduk di Kabupaten Sleman	62
Tabel 4.2.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Sleman dirinci Menurut Kecamatan pada tahun 1999	68
Tabel 5.1.	Peranan Kelompok Sektor Primer, Sekunder, dan tersier terhadap PDRB Kabupaten Sleman Tahun 1999-2001 (%)	87
Tabel 5.2.	Hasil Analisis <i>Shift Share</i> Sektor Ekonomi Propinsi D.I Yogyakarta Tahun 1993-2001 (Milyar Rupiah)	88
Tabel 5.3.	Hasil Analisis Location Quotien Sektor Ekonomi Kabupaten Sleman Tahun 1993-2001 (Milyar Rupiah)	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi nasional selama pemerintahan orde baru yang lebih terfokus pada pertumbuhan ternyata tidak membuat banyak daerah-daerah ditanah air berkembang dengan baik. Pada tingkat nasional memang laju pertumbuhan ekonomi rata-rata pertahun cukup tinggi dan tingkat pendapatan perkapita naik terus setiap tahun (hingga krisis terjadi). Dilihat di tingkat regional, kesenjangan pembangunan ekonomi antar propinsi semakin besar. Masalah ketimpangan ekonomi regional di Indonesia disebabkan karena selama pemerintahan orde baru. Berdasarkan UU No. 5 tahun 1974, pemerintah pusat menguasai dan mengontrol hampir semua sumber-sumber pendapatan daerah yang ditetapkan sebagai penerimaan negara. Termasuk pendapatan hasil dari sumber daya alam dari sektor-sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan/kelautan. Akibatnya, selama orde baru daerah-daerah yang kaya sumber daya alam tidak dapat menikmati hasilnya secara layak (Yafiz, 1999) juga pinjaman dan bantuan luar negeri, PMA, dan tata niaga didalam negeri diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat (Basri, 1993, Sondakh, 1999) sehingga hasil yang diterima daerah lebih rendah dari potensi ekonominya.

Konstelasi hubungan keuangan pusat dan daerah yang berlaku sejak pemerintahan orde baru hingga diberlakukannya Otonomi Daerah Januari 2001 lalu menyebabkan relatif kecilnya peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peranan atau kontribusi yang berawal dari pemerintah pusat dalam bentuk bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan mendominasi konfigurasi APBD. Sumber-sumber penerimaan yang relatif besar pada umumnya dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan sumber-sumber penerimaan yang relatif kecil dikelola oleh pemerintah daerah (Yafiz, 1999).

Salah satu kunci untuk itu adalah perlunya suatu reformasi dalam hubungan fiskal antar tingkat-tingkat pemerintah, yang meliputi desentralisasi kewenangan dalam pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Desentralisasi fiskal dinilai dapat memberikan sumbangan dalam menyediakan prasarana publik di daerah melalui pencocokan yang lebih baik dari pengeluaran daerah dengan prioritas dan preferensi daerah tersebut.

Ada 4 kriteria untuk menjamin sistem hubungan keuangan pusat dan daerah, yaitu (Sidik, 1999) :

1. Harus memberikan kewenangan yang rasional berbagai tingkat pemerintahan mengenai penggalan sumber dana pemerintah dan kewenangan penggunaannya.
2. Menyajikan suatu bagian yang memadai dari sumber-sumber dana masyarakat secara keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan fungsi-

fungsi penyediaan pelayanan dan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

3. Sejauh mungkin membagi pengeluaran pemerintah secara adil di antara daerah-daerah, atau sekurang-kurangnya memberikan prioritas pada pemerataan pelayanan kebutuhan dasar tertentu.
4. Pajak dan retribusi yang dikenakan Pemerintah Daerah harus sejalan dengan distribusi yang adil atas beban keseluruhan dari pengeluaran pemerintah dalam masyarakat.

Adanya UU Nomor 22/1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 akan membawa perubahan yang penting dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu dari pola yang sentralistik menjadi desentralisasi. Kewenangan dan tanggung jawab daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri semakin besar. Pola sentralistik yang selama ini masih berlaku akan semakin menyusut, dan desentralisasi kekuasaan akan terjadi. Daerah-daerah akan semakin otonom dan independen dalam sebagian aktifitas pemerintahan dan kemasyarakatan. Daerah, terutama tingkat Kabupaten, yang selama ini lebih banyak berfungsi sebagai pelaksana sebagian kecil kegiatan pembangunan di daerah, akan meningkatkan fungsinya bukan saja sebagai pelaksana pembangunan yang lebih luas, melainkan juga sebagai perencana dan juga evaluator kegiatan pembangunan itu sendiri. Hal ini berpotensi untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam aktifitas

pembangunan, karena mereka mendapat kepercayaan dan program pembangunan disusun sesuai kebutuhan masyarakat.

Melihat dari beberapa permasalahan tersebut di atas, jelaslah bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi nasional tidak terlepas dari peran serta dan aktifitas dari pembangunan daerah. Hal ini dapat kita lihat dari peningkatan pertumbuhan riil sektor ekonomi dari tahun ketahun.

PDRB merupakan penjumlahan atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat berbagai timbulnya aktifitas ekonomi dalam suatu wilayah/region. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Dari data PDRB dapat dilihat besaran nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor ekonomi. Peranan atau kontribusi sektor ekonomi menunjukkan struktur perekonomian yang terbentuk disuatu daerah. Kemampuan masing-masing Kabupaten/Kota dalam memberikan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB DIY serta perkembangannya, dapat dilihat pada Tabel 1.2. Berdasarkan tabel tersebut bahwa sampai dengan tahun 1999 tidak terjadi pergeseran kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap pembentukan PDRB Propinsi DIY. Kabupaten Sleman masih tetap merupakakn penyumbang terbesar terhadap PDRB DIY dengan kontribusi sebesar 28,95 %, kemudian kota Yogyakarta sebagai penyumbang terbesar kedua yaitu sebesar 26,20 %. Selanjutnya urutan ketiga adalah Kabupaten Bantul dengan kontribusi sebesar

17,27 %, diikuti Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo dengan kontribusi masing-masing sebesar 17,10 % dan 9,48 %.

Disamping sebagai penyumbang terbesar terhadap PDRB DIY tahun 1999, kontribusi Kabupaten Sleman di tahun ini juga menunjukkan adanya peningkatan yang cukup tinggi. Pada tahun 1998 kontribusi Kabupaten Sleman terhadap PDRB DIY adalah sebesar 28,55 % meningkat menjadi 28,95 % pada tahun 1999. Hal serupa juga terlihat pada kontribusi Kabupaten Bantul yang mengalami peningkatan sekitar 0,23 poin, yakni dari 18,04 % pada tahun 1998 menjadi 18,27 % pada tahun 1999. Sebaliknya, kontribusi Kota Yogyakarta dan dua Kabupaten lainnya terhadap PDRB DIY pada tahun 1999 terlihat menurun dibandingkan dengan keadaan tahun 1998.

Tabel 1.1
 Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993-2001
 Tahun Dasar 1993 (Jutaan rupiah)

LAPANGAN USAHA	TAHUN								
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pertanian	699,851	716,889	747,526	795,211	822,446	865,395	817,810	901,380	886,990
Pertambangan & Penggalian	59,270	64,045	67,714	69,960	71,548	60,251	60,476	60,555	60,917
Industri & Pengolahan	511,439	601,917	635,002	694,724	701,976	659,816	682,440	664,115	677,486
Litrik, Gas, dan Air Bersih	24,219	28,327	30,607	28,896	31,374	31,429	35,344	38,128	39,004
Bangunan	422,300	451,468	493,891	532,827	552,853	371,345	383,269	400,859	412,355
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	623,561	676,167	733,368	797,939	828,299	741,795	761,008	791,621	846,634
Pengangkutan dan Komunikasi	467,263	502,371	538,537	575,293	593,459	541,280	552,812	609,593	672,922
Keuangan, Persewaan, dan Jasa	415,609	444,862	499,920	544,353	567,462	527,472	531,007	524,512	543,471
Perusahaan									
Jasa - Jasa	834,516	901,028	995,338	1067,143	1116,950	977,631	1000,279	1026,947	1042,764
Produk Domestik Regional Bruto (Rp)	4,058,028	4,387,074	4,741,903	5,106,349	5,286,367	4,685,777	4,824,446	5,017,709	5,182,544

Sumber : BPS Yogyakarta

Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari besarnya peranan sektor-sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB. Selama tahun 1993-2001, struktur perekonomian Kabupaten Sleman didominasi oleh 5 sektor ekonomi yaitu, Sektor Pertanian, Sektor Industri, Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta Sektor Jasa-Jasa. Perkembangan kontribusi kelima sektor tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sleman
 Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 --2001
 Tahun Dasar 1993 (Jutaan Rupiah)

LAPANGAN USAHA	TAHUN								
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pertanian	197,505	213,042	231,278	218,908	227,124	181,342	187,815	205,817	212,155
Pertambangan & Penggalan	5,997	6,473	7,138	7,420	7,198	5,866	6,059	6,337	6,583
Industri & Pengolahan Litrik, Gas, dan Air Bersih	197,064	219,249	223,786	234,823	231,832	220,433	233,125	234,455	247,103
Bangunan Perdagangan, Hotel, dan Restoran	7,562	8,114	7,950	7,604	7,918	9,748	9,902	10,360	10,562
Pengangkutan dan Komunikasi	168,053	157,255	177,165	173,869	180,772	144,138	147,482	150,620	154,596
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	247,907	253,310	245,924	234,723	250,567	250,382	255,535	266,711	279,591
Jasa -- Jasa	167,061	163,287	151,673	149,663	158,272	150,438	151,753	156,013	162,129
Produk Domestik Regional Bruto	174,268	165,830	170,357	172,883	177,540	173,300	175,675	168,151	175,393
	250,634	263,127	2224,820	246,317	256,107	242,442	247,312	253,308	261,721
	1,416.051	1,449.687	1,440.091	1,446.210	1,497.330	1,378.089	1,404.658	1,451.772	1,509.833

Sumber : BPS Yogyakarta

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Sleman pada tahun 1997 mengalami penurunan lebih dari separuhnya dari tingkat pertumbuhan tahun sebelumnya (1996). Perekonomian Kabupaten Sleman pada tahun 1996 mengalami pertumbuhan 8,25 %. Akibat krisis perekonomian, pertumbuhan ekonomi

kabupaten Sleman pada tahun 1997 sebesar 3,58 % dan target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman 7,41 % per tahun tak mampu tercapai.

Sektor-sektor ekonomi yang mengalami masa teramat berat akibat krisis ekonomi adalah sektor properti, konstruksi dan perbankan. Sektor industri yang tidak berorientasi ekspor serta kandungan importnya tinggi, akan mengalami masalah yang cukup berat pula. Tingkat suku bunga perbankan yang tinggi serta turunya daya beli masyarakat menjadi tantangan pula bagi dunia usaha saat ini, dan investasi sebaiknya diarahkan pada usaha-usaha yang berorientasi ekspor serta usaha yang bisa menghasilkan substitusi impor.

Pertumbuhan PDRB tak lepas dari peran setiap sektor-sektor ekonomi diatas. Besar kecilnya kontribusi pendapatan sektor ekonomi merupakan hasil dari perencanaan serta pelaksanaan pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah. Hal ini dapat terlihat dari tabel 1.2 diatas, dimana tingkat PDRB kabupaten Sleman meningkat dengan tajam. Laju pertumbuhan PDRB merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan perekonomian suatu daerah. Perkembangan dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi suatu daerah membawa dampak terhadap perubahan struktur perekonomian daerah tersebut.

Tabel 1.3
Distribusi Persentase dan Tingkat Pertumbuhan Sektor industri Pengolahan, Sektor konstruksi, sektor keuangan, Persewaan dan Jasa Tahun 1994-1997

Sektor		1994	1995	1996	1997
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
S.3	DP	17,13	16,99	17,61	16,61
	TP	22,83	6,50	9,80	-1,27
S.5	DP	10,80	11,11	11,56	11,07
	TP	8,03	9,77	9,66	3,97
S.8	DP	11,36	11,16	10,70	10,50
	TP	8,66	8,70	7,25	2,69
S(3+5+8)	DP	39,29	39,26	39,87	38,18
	TP	13,81	8,12	8,99	1,47

Sumber : BPS Yogyakarta

Keterangan :

S.3 : Sektor Industri Pengolahan

S.5 : Sektor Konstruksi

S.8 : Sektor Jasa-Jasa, Keuangan, Persewaan

DP : Distribusi Persentase

TP : Tingkat Pertumbuhan

Dari tabel diatas, bisa kita perhatikan konstribusi ketiga sektor tersebut melebihi sepertiga dari total PDRB Kabupaten Sleman. Pada tahun 1997 konstribusi ketiga sektor diatas mengalami penurunan 4,24 % yaitu dari 39,87 % pada tahun 1996 menjadi 38,18 % pada tahun 1997.

Penurunan tingkat pertumbuhan industri cukup memprihatinkan dari 9,80% pada tahun 1996 menjadi -1,27 % pada tahun 1997. Bahkan apabila

kita perhatikan pada tahun 1994 pertumbuhan di sektor ini cukup tinggi yaitu 22,83 %. Naiknya harga bahan baku ditambah dengan depresiasi rupiah yang semakin tinggi serta adanya bunga perbankan yang tinggi mengakibatkan naiknya biaya produksi, serta menurunkan nilai tambah yang di hasilkan. Disamping ada perusahaan yang terpaksa harus memutus hubungan kerja para karyawannya, atau bahkan harus gulung tikar, berpengaruh terhadap perkembangan sektor industri.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha di sektor konstruksi. Akibat adanya proyek-proyek yang terpaksa dibatalkan. Kontribusi sektor ini mengalami penurunan dari 11,56 % pada tahun 1996 menjadi 11,07 %. Namun begitu sektor ini masih mampu tumbuh 3,97 % walaupun pada tahun sebelumnya mampu tumbuh 9,66 %.

Di tinjau dari nilai distribusi, kita bisa melihat sektor-sektor yang diandalkan disuatu daerah. Dari tahun ke tahun sektor-sektor yang menjadi unggulan PDRB kabupaten Sleman meliputi : sektor pertanian, sektor industri, sektor perdagangan, hotel, restoran, dan sektor jasa.

Tabel 1.4
Distribusi Persentase dan Tingkat Pertumbuhan Sektor - Sektor Unggulan Kabupaten Sleman Tahun 1994-1997

SEKTOR		1994	1995	1996	1997
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
S.1	DP	17,22	16,65	16,64	17,57
	TP	1,67	3,53	6,78	3,78
S.3	DP	17,13	16,99	17,61	16,61
	TP	22,83	6,50	9,80	-1,27
S.6	DP	16,32	16,58	16,39	17,00
	TP	5,33	8,93	8,69	6,75
S.9	DP	16,39	16,59	16,39	16,38
	TP	9,48	11,65	7,69	3,97
S(1,3,6,9)	DP	67,06	66,81	67,03	67,50
	TP	9,32	7,68	8,25	3,31

Sumber : BPS Yogyakarta

Keterangan :

S.1 : Sektor Pertanian

S.3 : Sektor Industri Pengolahan

S.6 : Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran

S.9 : Sektor Jasa-Jasa

DP : Distribusi Persentase

TP : Tingkat Pertumbuhan

Sektor industri yang pada tahun sebelumnya yaitu tahun 1995 dan tahun 1996 telah mampu menjadi sektor andalan dan telah tergeser oleh sektor pertanian yang sedikit lebih tangguh dalam menghadapi krisis sekarang, walaupun pertumbuhannya mengalami penurunan, namun sumbanganya

terhadap total PDRB Kabupaten Sleman menjadi lebih besar. Sumbangan sektor pertanian pada tahun 1996 sebesar 16,64 % menjadi 17,57 % pada tahun 1997. Pada tahun ini sektor pertanian mampu menjadi andalan utama Kabupaten Sleman.

Dari keempat sektor unggulan tadi, dua sektor yang sumbangannya menjadi lebih besar dibanding tahun sebelumnya, kedua sektor tersebut adalah sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel, restoran. Kondisi perekonomian yang tidak menentu berpengaruh terhadap sektor-sektor perekonomian, tidak terkecuali sektor perdagangan, hotel, restoran. Pada tahun ini pertumbuhan sektor ini sebesar 6,75 % lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mengalami pertumbuhan sebesar 8,69 %. Namun demikian sumbangan sektor ini mengalami peningkatan di banding tahun sebelumnya. Pada tahun 1996 sumbangan sektor ini 16,39 % dan pada tahun 1997 meningkat menjadi 17,00 %.

Secara makro sektor ekonomi dapat pula dibagi menjadi tiga kelompok besar yang sering disebut sebagai sektor primer, sekunder, dan tersier. Pengelompokan sektor ini berdasarkan output maupun input dari asal terjadinya proses produksi untuk masing-masing sektor.

Tabel 1.5
Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Sleman 1993 – 1997

Tahun	PDRB per Kapita	Perkembangan PDRB per Kapita Tahun 1993-1997
(1)	(2)	(3)
1993	1.428.266	-
1994	1.735.274	21,50
1995	1.994.036	14,91
1996	2.265.753	13,63
1997	2.553.516	12,70

Sumber : BPS Yogyakarta

Ditinjau dari rupiah yang diperoleh, nilai PDRB per kapita Kabupaten Sleman dari tahun ketahun semakin meningkat. Namun begitu dengan kondisi semakin menurunnya nilai rupiah kenaikan PDRB per kapita penduduk belum tentu mengakibatkan naiknya tingkat kemakmuran masyarakat. Pada tahun 1997 PDRB per kapita Kabupaten Sleman meningkat 12,70 % dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 1.6
Perbandingan Sumbangan Sektor PDRB dengan Persentase Penduduk 10 Tahun ke
atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama

Sektor	Distribusi PDRB	Persentase Penduduk
(1)	(2)	(3)
Pertanian	17,57	26,25
Pertambangan dan Penggalian	0,48	1,42
Industri Pengolahan	16,61	12,24
Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,65	0,69
Bangunan	11,07	7,95
Perdagangan, hotel, dan restoran	17,00	22,08
Angkutan dan Komunikasi	9,75	4,60
Keuangan, persewaan, dan Jasa Perusahaan	10,50	1,34
Jasa – Jasa	16,38	23,16
Lainya		0,28

Sumber : BPS Yogyakarta

Dilihat dari Tabel 1.6 diatas menunjukkan sektor-sektor yang menjadi unggulan (pertanian, industri, perdagangan, hotel, dan jasa) persentase penyerapan kerjanya juga tinggi. Bahkan sektor pertanian, perdagangan, hotel, restoran dan jasa mampu menyerap lebih dari 20 % tenaga kerja, masing-masing menyerap 26,25 %; 22,08 %; dan 23,16 %.

Secara makro pertumbuhan ekonomi atau kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun merupakan salah satu indikator

dari keberhasilan pembangunan. PDRB dikategorikan dalam 9 sektor ekonomi sebagai berikut :

1. Sektor Pertanian
2. Sektor Pertambangan dan Galian
3. Sektor Industri
4. Sektor Listrik, Gas, dan Air Minum
5. Sektor Bangunan dan Konstruksi
6. Sektor Perdagangan
7. Sektor Angkutan dan Komunikasi
8. Sektor Bank dan Lembaga Keuangan
9. Sektor Jasa-Jasa.

Pertumbuhan PDRB tak lepas dari peran setiap sektor – sektor ekonomi di atas. Besar kecilnya kontribusi pendapatan sektor ekonomi merupakan hasil dari perencanaan serta pelaksanaan pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti penentuan spesialisasi sektor di Kabupaten Sleman dengan judul ” **Analisis Penentuan Spesialisasi Sektor Ekonomi Di Kabupaten Sleman Dalam Menghadapi Implementasi Otonomi Daerah Periode 1993 - 2001** ”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka pokok permasalahannya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana pergeseran atau perubahan struktur ekonomi yang terjadi dalam perekonomian Kabupaten Sleman selama tahun 1993-2001.
2. Sektor ekonomi apa yang dapat di jadikan sebagai sektor unggulan atau spesialisasi sektor di Kabupaten Sleman selama tahun 1993-2001.
3. Bagaimana tingkat pertumbuhan sektor ekonomi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1993-2001 dibandingkan dengan sektor ekonomi Kabupaten Sleman.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan sektor perekonomian Kabupaten Sleman dari tahun 1993-2001.
2. Untuk mengetahui sektor-sektor yang menjadi sektor basis di Kabupaten Sleman.
3. Untuk mengetahui pergeseran atau perubahan yang terjadi dalam sektor ekonomi Kabupaten Sleman selama tahun 1993-2001.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi aparatatur pemerintah, diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan bahan evaluasi agar dapat lebih memantapkan perencanaan daerah dimasa yang akan datang.
2. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan bacaan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.
4. Bagi penulis, merupakan syarat untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

1.5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif

a. Metode Kualitatif

Metode kualitatif adalah suatu metode yang dipaparkan dalam analisis variabel yang tidak dapat diukur atau menggunakan analisis yang bersifat menguraikan data dengan tidak menggunakan angka, tetapi menganalisis data yang berupa artikel-artikel atau laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Metode kuantitatif

Metode Kuantitatif adalah suatu metode yan didasarkan pada analisis variabel yang dapat dinyatakan dengan jelas atau menggunakan

rumus yang pasti dengan menggunakan teknik analisis pembangunan yaitu *Analisis Shift Share* dan *Location Quotient*.

1) Analisis *Shift Share*

Analisis *shift share* digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur ekonomi daerah terhadap struktur ekonomi regional atau nasional, sehingga dapat diketahui kinerja (*performance*) perekonomian di suatu daerah dibandingkan dengan kinerja daerah yang lebih luas (regional atau nasional). Apabila dari perbandingan tersebut terdapat penyimpangan positif maka daerah tersebut ada keunggulan kompetitif dan apabila penyimpangan dari perbandingan tersebut negatif maka daerah tersebut tidak ada keunggulan kompetitif.

Teknik *Shift Share* ini membandingkan laju pertumbuhan sektor-sektor perekonomian disuatu daerah dengan laju pertumbuhan sektor perekonomian secara nasional.

Melihat laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi daerah dan nasional akan dapat dilihat adanya pergeseran (*Shift*) sektor perekonomian daerah sekaligus melihat bila daerah itu memperoleh pertumbuhan dan kemajuan sesuai dengan kedudukannya dalam perekonomian nasional. Teknik analisis *Shift Share* ini membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu variabel wilayah, yaitu pendapatan atau output sektor-sektor

ekonomi daerah dalam waktu tertentu. Pertumbuhan nasional (N) merupakan kenaikan GNP secara nasional tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi. Bauran industri (M) atau *shift propotional (P-Shift)* merupakan suatu jumlah pertumbuhan industri disuatu daerah dimana data lebih cepat atau lebih lambat dari tingkat pertumbuhan produksi regional karena tingginya konsentrasi industri/sektor regional. Bila *P-Shift* bernilai positif maka pada tingkat regional sektor tersebut tumbuh relatif lebih cepat, sebaliknya bila *P-Shift* nilainya negatif maka berarti pada tingkat regional sektor tersebut tumbuh lebih lambat. Bauran kompetitif (C) atau *Shift Differensial (D-Shift)* merupakan jumlah pertumbuhan suatu sektor disuatu daerah lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor yang sama di wilayah lain. Bila *D-Shift* bernilai positif maka sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di wilayah lain, sebaliknya jika *D-Shift* negatif maka sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah lain. Pengaruh keunggulan kompetitif disebut *Regional Share*. Karena itu analisis ini disebut Teknik *Analisis Shift Share* (Prasetyo Supeno,1993).

Bentuk umumnya :

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} \dots \dots \dots (1)$$

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah pendapatan persektor yang dinotasikan sebagai (Y)

$$D_{ij} = Y^*_{ij} - Y_{ij} \dots \dots \dots (2)$$

$$N_{ij} = Y_{ij} - r_n \dots \dots \dots (3)$$

$$M_{ij} = Y_{ij} (r_{in} - r_n) \dots \dots \dots (4)$$

$$C_{ij} = Y_{ij} (r_{ij} - r_{in}) \dots \dots \dots (5)$$

Dimana r_{ij} , r_{in} , r_n mewakili laju pertumbuhan wilayah dan nasional yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut :

$$r_{ij} = (Y^*_{ij} - Y_{ij}) / Y_{ij} \dots \dots \dots (6)$$

$$r_{in} = (Y^*_{in} - Y_{in}) / Y_{in} \dots \dots \dots (7)$$

$$r_n = (Y^*_n - Y_n) / Y_n \dots \dots \dots (8)$$

Secara keseluruhan wilayah, persamaan untuk sektor i diwilayah j adalah :

$$D_{ij} = Y_{ij}.r_n + Y_{ij} (r_{in} - r_n) + Y_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

Keterangan :

D = Variabel wilayah.

N = Pertumbuhan nasional.

M = bauran industri.

C = Keunggulan kompetitif.

Y_{ij} = Pendapatan disektor i di wilayah j.

Y_{in} = Pendapatan sektor Ii ditingkat nasional.

* = Pendapatan akhir tahun analisis.

2) Analisis *Location Quotient* (LQ)

Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk menganalisis ada tidaknya spesialisasi suatu daerah untuk industri (sektor). Formula LQ adalah sebagai berikut (Hermanto, 2000):

$$LQ = \frac{E_{ij}/E_j}{E_{in}/E_n}$$

Keterangan

LQ = koefisien LQ

E_{ij} = kesempatan kerja di sektor i di daerah j

E_j = kesempatan kerja di daerah j

E_{in} = kesempatan kerja di sektor i di tingkat regional

E_n = kesempatan kerja di tingkat regional

Interpretasi dari hasil perhitungan dengan formula tersebut adalah:

- Apabila nilai $LQ > 1$ wilayah j untuk industri i ada spesialisasi (tingkat spesialisasi daerah lebih besar daripada spesialisasi di tingkat regional)
- Apabila nilai $LQ = 1$ maka tingkat spesialisasi daerah sama dengan spesialisasi tingkat regional
- Apabila nilai $LQ < 1$ maka tidak ada spesialisasi (tingkat spesialisasi daerah lebih kecil daripada spesialisasi di tingkat regional)

Dalam penelitian ini diasumsikan :

1. Selera dan pola pengeluaran disuatu daerah dengan daerah lain di Indonesia adalah sama.
2. Setiap penduduk disuatu daerah mempunyai pola permintaan terhadap suatu barang dan jasa sama dengan pola permintaan barang dan jasa pada tingkat nasional.
3. Tingkat konsumsi rata-rata untuk masing-masing barang dan jasa disetiap daerah adalah sama.

Tabel 1.6
Kemungkinan-kemungkinan dari Pengaruh Alokasi

No	Pengaruh Alokasi (A_{ij})	Komponen		Definisi
		$(E_{ij}-E'_{ij})$	$(r_{ij}-r_{in})$	
1	-	+	-	Tidak ada keunggulan kompetitif, ada spesialisasi
2	+	-	-	Tidak ada keunggulan kompetitif, tidak ada spesialisasi
3	-	-	+	Ada keunggulan kompetitif tidak ada spesialisasi
4	+	+	+	Ada keunggulan kompetitif, ada spesialisasi

Sumber: Hermanto, 2000

1.6. Metode Penelitian

1. Daerah Penelitian

Penelitian ini mengambil daerah penelitian di Kabupaten Sleman. Dimana penelitian dimasukan ke dalam bidang ekonomi makro karena menyangkut output total yang diproduksi oleh daerah (PDRB) yang merupakan ukuran paling komprehensif akan barang-barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu masyarakat.

2. Jenis Sumber Data

a. Jenis Data Primer dan Data Sekunder

Data primer adalah data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti dilapangan atau langsung dari sumbernya.

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulanya oleh peneliti, misalnya dari Biro Pusat Statistik, keterangan-keterangan dan publikasi lainnya.

b. Sumber Data

Sumber data berasal dari pencatatan angka-angka, laporan-laporan dari instansi terkait yang sesuai dengan masalah yang diteliti antara lain diperoleh dari :

1) Biro Pusat Statistik, yaitu :

PDRB Propinsi D.I.Y menurut sektor tahun 1993-2001 dan PDRB kabupaten Sleman dari tahun 1993-2001.

2) Kesempatan Kerja persektor

Kesempatan kerja persektor adalah sejumlah orang yang bekerja pada sektor ekonomi tertentu (jiwa) dalam satu tahun.

Penelitian ini dilakukan pada sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Sleman, dimana yang menjadi obyek penelitian adalah 9 sektor ekonomi di Kabupaten Sleman yang dikelompokkan sebagai berikut :

a) Kelompok sektor primer, yang terdiri dari :

- * Sektor Pertanian
- * Sektor Pertambangan dan Galian

b) Kelompok sekunder, yang terdiri dari :

- * Sektor Industri dan Pengolahan
- * Sektor Listrik, Gas dan Air Minum
- * Sektor Bangunan

c) Kelompok sektor tersier, yang terdiri dari :

- * Sektor Perdagangan
- * Sektor Angkutan dan Komunikasi
- * Sektor Bank dan Lembaga Keuangan
- * Sektor Jasa

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan sumber pustaka atau studi pustaka.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini akan disusun dalam tema, bab dalam urutan sebagai berikut:

BAB I :

Merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :

Berisi tentang landasan teori yaitu teori-teori yang relevan dengan obyek penelitian tersebut.

BAB III :

Berisi tentang kajian pustaka, yaitu pengkajian dari penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama. Dari proses atau usaha ini ditemukan kelemahan /kekurangan penelitian yang lalu, sehingga dapat dijelaskan dimana letak hubungan, perbedaan maupun posisi penelitian ini dengan penelitian-penelitian tersebut sekalipun dihindari duplikasi.

BAB IV :

Berisi tentang gambaran umum daerah penelitian yang meliputi keadaan wilayah, keadaan penduduk, keadaan tenaga kerja, keadaan ekonomi daerah Kabupaten Sleman.

BAB V:

Berisi tentang analisa data meliputi data-data yang diperluas untuk dihitung, hasil perhitungan analisis *shift share* dan analisis location quotient serta penjelasan-penjelasan dari hasil perhitungan yang telah dilakukan.

BAB VI :

Berisi tentang berbagai kesimpulan yang didapat dari hasil perhitungan serta saran-saran yang sesuai dengan permasalahan.

Bab II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi

Sebelum membahas pembangunan ekonomi, sebaiknya ditinjau dahulu pengertian dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah adalah "suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tertentu." (Lincoln Arsyad, 1999:108)

Proses pembangunan pada dasarnya bukanlah sekedar fenomena ekonomi semata. Pembangunan tidak sekedar ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara. Dimensi sosial yang sering terabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi, mendapat proses strategis bagi proses pertumbuhan. Dalam proses pembangunan, selain mempertimbangkan aspek pertumbuhan dan pemerataan, juga mempertimbangkan dampak aktifitas ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Pembangunan yang menjadi obsesi banyak negara tidak berjalan seperti yang diharapkan. Laju pertumbuhan ekonomi memang meningkat dan

modernisasi dapat diwujudkan. Namun diiringi oleh persoalan pembangunan yang selalu nyata, masalah pengangguran dan setengah pengangguran, tingkat urbanisasi yang tinggi menciptakan masyarakat miskin di kota, masalah kemiskinan yang tidak terpecahkan akibat pembangunan yang tidak merata dan berbagai kepincangan serta kesenjangan lainnya.

Dewasa ini, definisi pembangunan yang banyak diterima adalah suatu proses dimana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah “ garis kemiskinan absolut “ tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang (Mudrajad Kuncoro, 1997, hal 17).

Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP / GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Lincoln Arsyad, 1992, hal 15).

Yang dimaksud dengan proses dalam pembangunan ekonomi adalah berlangsungnya kekuatan-kekuatan tertentu yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi. Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*grow plus change*) dalam:

1. Perubahan struktur ekonomi; dari pertanian ke industri atau jasa
2. Perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi atau reformasi kelembagaan itu sendiri.

Penekanan pada kenaikan pendapatan per kapita (GNP riil di bagi jumlah penduduk) dan tidak hanya kenaikan pendapatan nasional riil menyiratkan bahwa perhatian pembangunan bagi negara miskin adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Pendapatan nasional riil (GNP pada harga konstan) yang meningkat seringkali tidak diikuti dengan perbaikan kualitas hidup. Bila pertumbuhan penduduk melebihi atau sama dengan pertumbuhan pendapatan nasional maka pendapatan per kapita bisa menurun atau tidak berubah dan jelas ini tidak dapat dikatakan sebagai pembangunan ekonomi.

Kurun waktu yang panjang menyiratkan bahwa kenaikan pendapatan per kapita perlu berlangsung terus menerus dan berkelanjutan. Rencana pembangunan lima tahun baru merupakan awal dari proses pembangunan. Tugas yang paling berat adalah menjaga stabilitas pembanguan dalam jangka yang lebih panjang.

Tambahan catatan berupa rekor kemiskinan absolut dan distribusi pendapatan agaknya menunjuk pentingnya kualitas proses pembangunan, karena pembangunan bukan merupakan tujuan melainkan hanya alat sebagai proses instrumental untuk menurunkan kemiskinan, menyerap tenaga kerja dan menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Dengan demikian, Suatu perekonomian baru dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang jika pendapatan per kapita menunjukkan kecenderungan jangka panjang yang meningkat dan kegiatan ekonomi secara rata-rata meningkat dari tahun ketahun, maka masyarakat dapatlah dikatakan mengalami pembangunan ekonomi. Sedangkan teori-teori yang mendukung terhadap pembangunan ekonomi daerah adalah sebagai berikut:

2.1.1 Teori-Teori Klasik

Teori ini memberikan dua konsep dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan (*equilibriumi*) dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiah jika modal bisa mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Oleh karena itu modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi ke daerah yang berupah rendah tanpa adanya campur tangan pemerintah.

Besarnya derajat campur tangan pemerintah dalam aktifitas ekonomi, merebaknya korupsi, dan kurangnya intensif ekonomi, serta kesalahan dalam pengalokasian sumberdaya, merupakan sumber utama dari keterbelakangan suatu negara dalam mengelola perekonomian. Alokasi sumberdaya yang salah menyebabkan kebijakan penetapan harga menjadi tidak efektif dan ditambah campur tangan pemerintah yang terlalu besar dalam perekonomian. Akibatnya percepatan pertumbuhan perekonomian menjadi lebih lambat, sementara disisi

lain kesalahan sistem alokasi sumberdaya tidak menunjang terhadap tujuan pemerataan pembangunan.

Kaum Neo Klasik menyatakan bahwa dengan membebaskan pasar dari campur tangan pemerintah, swastanisasi BUMN, promosi perdagangan bebas dan ekspansi ekspor, membuka diri terhadap PMA, dan mengeliminasi ketidakefisienan dalam regulasi pemerintah (melakukan deregulasi), serta menghilangkan distorsi harga baik pada input, produk, dan pasar uang, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin maju. Pasar bebas dan perekonomian *laissez faire* kemudian menjadi kata kunci bagi keberhasilan pembangunan.

2.1.2. Teori Basis Ekonomi

Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja (*job creation*). Strategi pembangunan daerah yang muncul berdasarkan teori ini adalah penekanan terhadap arti penting bantuan (*aid*) kepada dunia usaha secara nasional maupun internasional.

Jhon Glasson dan Paul Sitohang (1990) menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian regional dapat dibagi dalam dua sektor :

1. Kegiatan-kegiatan non basis (*non-basic activities*)

Kegiatan non basis adalah kegiatan-kegiatan yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan orang-orang yang bertempat tinggal didalam batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan produksi yang dilakukan hanya ditujukan untuk daerah pasar mereka terutama bersifat lokal sehingga tidak menghasilkan ekspor.

2. Kegiatan-kegiatan basis (*basic activities*)

Kegiatan basis adalah kegiatan-kegiatan yang mengekspor barang-barang dan jasa-jasa ketempat diluar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan, atau yang memasarkan barang-barang dan jasa-jasa mereka kepada orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan dua tipe pendekatan dalam penentuan kegiatan basis dalam metode tidak langsung yang terdiri dari dua tipe yaitu cara pendekatan ad hoc dan metode *Location Quotient* (LQ), maka teknik analisis LQ merupakan metode yang lazim digunakan untuk mengetahui secara empiris suatu kegiatan tertentu termasuk basis atau bukan basis. Dengan metode LQ akan dilakukan pengukuran konsentrasi dari kegiatan dalam suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan sejenis dalam perekonomian nasional.

2.1.3 Teori-teori Modern

Teori-teori modern mencakup 4 sub golongan, yaitu:

- a. Teori pertumbuhan yang berawal dari teori makro Keynes, termasuk di sini teori pertumbuhan Harrod-Domar.
- b. Teori pertumbuhan Neo-Klasik yang diawali oleh Robert Solow dan Trevor Swan.
- c. Teori pertumbuhan optimum, yaitu teori yang bertujuan mencari jalur paling baik (optimum) bagi suatu prekonomian nasional.
- d. Teori pertumbuhan dengan uang, teori ini dikembangkan sebagai lanjutan dari teori pertumbuhan Neo-Klasik tapi tambahannya adalah uang.

Teori pertumbuhan Keynes juga relevan dengan kebijakan yang diambil di negara sedang berkembang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Teori Keynes menentukan pentingnya tabungan dan investasi suatu campur tangan pemerintah. Untuk menstabilkan keduanya dapat dilihat dari berbagai fasilitas dan kemudahan yang diberikan pemerintah kepada investor dalam negeri maupun investor asing.

Menurut Keynes tingkat pendapatan nyata tertentu dapat dipertahankan dalam sistem yang sederhana selama penanaman modal tetap berada pada suatu tingkat yang tidak berubah.

Jika tingkat investasi naik, maka pendapatan ekuilibrium akan naik beberapa kali lipat dari kenaikan investasi. Investasi juga memperbesar kemampuan produksi. Hal ini tidaklah diakibatkan oleh sekedar penambahan investasi, tapi juga oleh jumlah investasi bersih dalam tiap-tiap masa. Teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar merupakan pengembangan teori makro Keynes dari analisis jangka pendek menjadi analisis jangka panjang dengan syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang secara mantap (*steady growth*). Dalam menganalisis pertumbuhan secara mantap Harrod-Domar mendasarkan pada beberapa asumsi :

1. Perekonomian berada dalam kondisi pengerjaan penuh (*full employment*) dan kapital yang digunakan secara penuh.
2. Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan.
3. Besarnya tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya pendapatan nasional.
4. MPS, COR, ICOR konstant.

COR dan ICOR menggambarkan hubungan antara tingkat output dengan investasi (tambahan kapital) yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat output tersebut. Dalam konsep matematis dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{COR} = k/y \dots \dots \dots (1)$$

$$\text{ICOR} = \Delta k / \Delta y \dots \dots \dots (2)$$

Dimana :

K = stok kapital

Y = output / pendapatan nasional

Pada kondisi keseimbangan, tabungan nasional (S) = investasi nasional (I) sehingga :

$$S = I$$

$$S = k$$

$$S = \text{COR} \cdot \Delta Y$$

$$S = \text{MPS} \cdot Y \dots \dots \dots (3)$$

$$\text{Maka } \text{MPS} \cdot Y = \text{COR} \cdot \Delta Y \dots \dots \dots (4)$$

C = tingkat pertumbuhan out put / persentase perubahan out put

$$\Delta Y/Y = \text{MPS} / \text{COR} \dots \dots \dots (5)$$

C= persamaan Harrod-Domar yang disederhanakan

Jadi, tingkat pertumbuhan out put ditentukan bersama oleh MPS dan COR. Tingkat pertumbuhan output berhubungan positif dengan MPS, sedang COR berpengaruh secara negatif terhadap tingkat pertumbuhan output.

Sebenarnya tingkat pertumbuhan output riil tergantung pada tingkat produktifitas investasi yang dapat dihitung dengan

I/COR . I/COR menggambarkan rasio output kapital atau rasio output investasi, sehingga persamaan $Y/Y = MPS/COR$ dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$MPS \cdot I/COR = I/Y \cdot \Delta Y/I$$

$$MPS \cdot I/COR = \Delta Y/Y \dots \dots \dots (6)$$

Sehingga:

$$MPS = I/Y (= \text{investasi baru}) \dots \dots \dots (7)$$

Teori ini mengasumsikan adanya perubahan akan teknologi yang masuk dalam perekonomian dalam wujud barang-barang modal yang baru dengan demikian laju pertumbuhan teknologi bergantung pada laju pertumbuhan investasi, pernyataan ini merupakan kritik terhadap teori Harrod-Domar. Sehingga fungsi produk pada model pertumbuhan neo-klasik secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = A \cdot f(k, n) \dots \dots \dots (8)$$

Dimana :

A = indeks pertumbuhan teknologi yang berubah sepanjang waktu, tapi pada saat ini dianggap konstan.

K = stok kapital

N = penawaran tenaga kerja.

Fungsi produksi diasumsikan memiliki beberapa karakteristik khusus. Pertama, produksi mengikuti pendapatan pada skala yang konstan (constant return to stock). Kedua, produksi mengikuti hukum hasil yang semakin menurun (the law of diminishing return)

Berkaitan dengan teori pembangunan ekonomi daerah, Michael P. Todaro (1991) mengemukakan tentang teori perubahan struktural. Teori ini menitik beratkan pada mekanisme transformasi perekonomian yang bersifat subsistem (sektor pertanian) dan kemudian diubah menuju struktur perekonomian modern yang didominasi sektor industri. Teori ini merupakan kombinasi dari teori migrasi yang dikemukakan oleh Arthur Lewis dan Hollis Chenery dengan teori transformasi struktural. Dalam teori migrasi Lewis menjelaskan bahwa, migrasi yang terjadi merupakan proses perpindahan tenaga kerja dan pertumbuhan tingkat pengerjaan di sektor modern, sehingga dapat menyebabkan pertumbuhan *output*. Sedangkan teori transformasi struktural adalah perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perekonomian suatu negara (daerah) yang mengalami transformasi dari sektor pertanian beralih ke sektor industri sebagai mesin pertumbuhan ekonominya.

Sedangkan J. Buodenville (Glasson, 1990) juga memaparkan mengenai teori kutub pertumbuhan. J. Buodenville mendefinisikan bahwa kutub pertumbuhan regional sebagai sekelompok industri yang mengalami ekspansi yang berlokasi di daerah perkotaan dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi daerah lain. Teori ini dapat memberikan keuntungan aglomerasi yang dapat memacu perkembangan ekonomi, pemusatan investasi yang dapat menghemat anggaran dan manfaat *spread effect* yang dapat ditimbulkan dari titik pertumbuhan untuk membantu memecahkan masalah yang dialami daerah lain.

Sementara H.W. Richardson (1991) mengemukakan teori basis ekspor. Teori ini merupakan bentuk model pendapatan regional yang paling sederhana. Teori ini menyederhanakan suatu sistem regional menjadi dua bagian yaitu daerah yang bersangkutan dan daerah selebihnya. Pentingnya teori ini terletak pada kerangka teoritik bagi banyak studi multiplier regional empiris.

2.2 Konsep Daerah

Menurut UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah, pengertian daerah adalah sebagai berikut :

“Daerah otonomi selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Disebutkan dalam UU No. 5 tahun 1974 bahwa ada dua daerah otonomi, yaitu daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Dengan demikian daerah dapat mengatur rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut wilayah, adat dan sifat sendiri-sendiri dalam kadar negara kesatuan. Dan tiap-tiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat daerah lain. Menurut Rihardson H.W., dalam bukunya berjudul “*Element of Regional Economic* “ mengatakan bahwa konsep tentang daerah dapat dibedakan menjadi dua macam daerah yang berbeda, yaitu daerah homogen dan daerah nodal.

Konsep daerah homogen (*Homogen Region*) memandang daerah sebagai suatu wilayah tata ruang/suatu daerah geografis yang dapat dikaitkan menjadi suatu daerah tunggal dan mempunyai ciri-ciri yang sama. Ciri-ciri ini bisa bersifat ekonomi, misalnya : struktur-struktur produksinya serupa atau pola iklimnya serupa, bahkan bisa pula bersifat sosial atau politik misalnya, suatu

kepribadian regional atau kesetiaan yang bersifat tradisional kepada suatu partai tertentu.

Konsep daerah nodal atau daerah berkutub (*Polarized Region*) memandang daerah dari sisi satu-satunya heterogen, misalnya, distribusi penduduk yang mengakibatkan terjadinya kota-kota besar, kotamadia, desa-desa dengan kata lain hirarki pemukiman, tetapi satu sama lain erat dan saling berhubungan secara fungsional. Sifat khas dari konsep ini adalah terletak pada kaitan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini setiap pusat atau sentral diasumsikan memiliki daerah terbelakang (*hinterland*).

2.3 Teori Perencanaan Daerah

Para ahli mempunyai dua pandangan yang berbeda tentang perlunya suatu perencanaan pembangunan daerah, dimana sebagian mengatakan setuju dan sebagian lagi menentang (Sadono Sukirno, 1995). Kelompok yang menentang mengemukakan alasannya sebagai berikut :

1. Pendapat dari ahli ekonomi yang masih percaya akan kemampuan mekanisme pasar untuk menciptakan perkembangan di daerah secara harmonis.
2. Campur tangan pemerintah akan mempengaruhi efisiensi dan corak kegiatan ekonomi bila ditinjau dari secara ruang atau wilayah.
3. Campur tangan pemerintah dianggap sebagai kebijakan yang sifatnya membantu yang gagal dan menghukum yang sukses.

Kelompok yang setuju, argumentasinya sebagai berikut :

1. Apabila perekonomian dikendalikan oleh mekanisme pasar dalam perekonomian akan timbul keadaan-keadaan yang akan menghambat perkembangan ekonomi di daerah yang lebih terbelakang.
2. Dalam sistem ekonomi mekanisme pasar, keputusan penentuan lokasi dan jenis usaha lebih banyak didasarkan secara terus menerus.
3. Bantuan dan campur tangan pemerintah diperlukan untuk menghemat pengeluaran pembangunan daerah dimasa yang akan datang.
4. Tujuan pembangunan bukan saja untuk mencapai tujuan yang bersifat ekonomi, tetapi juga tujuan yang bersifat sosial politik.

2.3.1. Pengertian Perencanaan

Perencanaan adalah suatu siklus yang sistematis dan selalu berkembang, dimulai dengan penentuan tujuan yang bersifat filosofis, mencermati kondisi pasar, menentukan tujuan, aturan dan prosedur, penentuan proyek dan akhirnya pengendalian dan evaluasi proyek (Ahmad Jamli, 1995).

Selain pengertian tentang perencanaan seperti di atas, ada juga pengertian lain tentang perencanaan, yaitu perencanaan merupakan suatu teknik atau cara untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan yang telah ditentukan dan dirumuskan oleh suatu badan perencanaan di tingkat pusat. Tujuan-tujuan tersebut dapat berupa tujuan ekonomi,

politik ataupun tujuan militer yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu (Lincoln Arsyad, 1993).

2.3.2. Ciri-ciri Perencanaan

Perencanaan pembangunan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Lincoln Arsyad, 1993) :

1. Mencerminkan suatu perencanaan untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap (steady growth). Hal ini dicerminkan dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang positif.
2. Mencerminkan suatu perencanaan untuk meningkatkan pendapatan dan perubahan struktur ekonomi. Hal ini disebut usaha diversifikasi ekonomi.
3. Adanya usaha perluasan kesempatan kerja.
4. Adanya usaha pemerataan pembangunan.
5. Adanya usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.
6. Adanya usaha secara terus menerus untuk menjaga stabilitas ekonomi.
7. Adanya usaha yang dilakukan agar kemampuan membangun secara bertahap lebih didasarkan pada kemampuan nasional.

2.3.3. Unsur-unsur pokok dalam Perencanaan Pembangunan

Unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Perumusan tujuan dan strategi dasar perencanaan pembangunan.
2. Adanya kerangka makro dimana dalam hal ini dihubungkan berbagai variabel pembangunan serta implikasi dari hubungan tersebut.
3. Perkiraan sumber-sumber pembangunan, khususnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan.
4. Adanya uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten, misalnya kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan anggaran dan kebijakan harga.
5. Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral.
6. Adanya administrasi pembangunan yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut.

2.3.4. Fungsi Perencanaan

Perencanaan berfungsi sebagai alat untuk mencapai sasaran yang lebih baik. Fungsi perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Dengan perencanaan diharapkan terdapat suatu pengerahan kegiatan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan pada pencapaian tujuan pembangunan.
2. Dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospek-prospek, perkembangan, dan hambatan-hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik.

4. Dengan adanya perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dari segala pentingnya tujuan.
5. Sebagai alat untuk mengukur standar mengadakan pengawasan evaluasi.

Dari sudut pandang ekonomi perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Agar penggunaan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas dapat lebih efektif dan efisien sehingga dapat dihindari adanya pemborosan.
2. Agar pertumbuhan ekonomi lebih mantap dan berkesinambungan.
3. Agar stabilitas ekonomi dalam menghadapi siklus konjungtur.

2.3.5. Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan dibagi dalam 4 tahap, yaitu :

1. Penyusunan rencana meliputi :
 - Tinjauan keadaan
 - Perkiraan keadaan masa yang datang.
 - Penetapan tujuan perencanaan.
 - Identifikasi kebijakan
 - Persetujuan perencanaan.

2. Penyusunan program perencanaan.
3. Pelaksanaan perencanaan.
4. Pengawasan atas pelaksanaan.

2.4. Model Perencanaan Pembangunan di Negara Sedang Berkembang

Terdapat beberapa model perencanaan pembangunan di Negara Sedang Berkembang (NSB) seperti Indonesia, yaitu :

1. Perencanaan Regional

Perencanaan ini dimaksudkan agar semua daerah dapat melaksanakan pembangunan secara proporsional dan merata sesuai dengan perencanaan yang ada di daerah tersebut. Bila perencanaan regional berkembang dengan baik, maka diharapkan kemandirian daerah dapat dimantapkan sehingga daerah tersebut tidak terlalu tergantung pada pusat.

2. Perencanaan Sektoral

Perencanaan sektoral sering diistilahkan dengan perencanaan departemen misalnya perencanaan bidang pertanian. Perencanaan ini sifatnya lebih spesifik disesuaikan dengan masing-masing sektor.

3. Perencanaan Proyek

Perencanaan ini di Indonesia disebut perencanaan APBN / APBD, karena dilaksanakan dalam waktu sekitar 1 tahun dan umumnya pembiayaannya diambil dari dana rutin tahunan yang tertuang dalam APBN / APBD.

4. Perencanaan Terpadu

Perencanaan ini sering diistilahkan sebagai perencanaan komprehensif (*Intergrated Plane*), maksud dari perencanaan ini adalah untuk menghindari perencanaan yang saling bertabrakan satu sama lain. Contoh dari perencanaan terpadu ini adalah Rapat Koordinasi Pembangunan (Soekartawi, 1990).

Perencanaan daerah atau regional yang digunakan dalam laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak akan terlepas dari arah pembangunan yang telah ditetapkan secara nasional, karena dengan kerjasama dan keterpaduan yang erat antara daerah dan pusat dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kesenjangan antara daerah. Keadaan tersebut akan tercapai apabila pemerintah ikut campur tangan terutama dalam mendistribusikan investasi, sehingga antara daerah yang satu dengan yang lainnya dapat berkembang secara beriringan.

Perbedaan perkembangan antar daerah terutama disebabkan oleh kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, kebijaksanaan yang dipilih daerah untuk memacu pembangunannya serta adanya konsentrasi kegiatan ekonomi tertentu yang menjadi perhatian daerah, sehingga keadaan ini menyebabkan ketimpangan antar daerah yang tidak dapat dihindari.

2.4.1 Kelemahan Perencanaan Pembangunan di Negara Sedang Berkembang

Kelemahan-kelemahan perencanaan pembangunan di Negara Sedang Berkembang (NSB), yaitu :

1. Sering kali lebih merupakan dokumen politik mengenai cita-cita pembangunan
2. Kurang mendapat dukungan politik yang diperlukan.
3. Kurangnya hubungan antara penyusunan rencana dan para penyusun dengan pelaksanaan rencana dan para pelaksana.
4. Kurangnya data statistik dan informasi hasil-hasil riset untuk mendasari suatu perencanaan yang baik.
5. Kurangnya penguasaan terhadap teknik-teknik perencanaan pembangunan.
6. Kurangnya kemampuan administrasi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan.

2.5. Perencanaan Pembangunan di Indonesia

Pada masa orde baru, strategi pembangunan nasional didasarkan atas pendekatan politik. Hal ini sesuai dengan situasi saat itu yakni perjuangan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan nasional sehingga tidak memungkinkan pelaksanaannya dilakukan secara baik. Usaha perencanaan-perencanaan orde baru antara lain :

1. Tahun 1947 dimulai suatu perencanaan beberapa sektor ekonomi dan diberi nama Plan Produksi 3 tahun Republik Indonesia untuk tahun 1947, 1949, 1950 ditujukan terhadap bidang pertanian, peternakan, perindustrian dan kehutanan.
2. Tahun 1952 dimulai usaha-usaha perencanaan yang lebih bersifat menyeluruh, walaupun intinya adalah tetap sektor publik.
3. Tahun 1950-1960 telah disusun suatu Repelita.
4. Tahun 1961-1969 berhasil disusun rencana pembangunan negara sementara berencana, yang meliputi jangka waktu 8 tahun, terbagi atas rencana tahapan 3 tahun dan 5 tahun.
5. Tahun 1966 sampai sekarang mulai disusun Repelita program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi.

Program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi pembangunan sejak orde baru sebenarnya berpangkal pada Nasional Building Approach dalam kerangka :

1. Jangka panjang :

Pendekatan pembangunan bangsa yang berdasarkan pada pendekatan pembangunan secara utuh dan terpadu (*Unified and Integratif*) antara berbagai aspek kehidupan.

2. Jangka Menengah :

Pendekatan pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih bertitik berat pada pembangunan sektor sosial, serta kelembagaan menuju kesejahteraan dan keadilan sosial.

Ada 2 dokumen perencanaan yang menjadi alasan kuat bagi pembangunan di Indonesia yaitu :

1. Dokumen Perencanaan Nasional, meliputi :

- Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)
- Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA)
- Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)

2. Dokumen Perencanaan Daerah, meliputi:

- Pola Dasar Pembangunan Daerah (PDPD)
- Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah (REPELITADA)
- Rancangan Anggaran atau Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

2.6. Tehnik Analisis dalam Perencanaan Pembangunan

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis perencanaan pembangunan yaitu teknik analisis *Shift Share Klasik* dan teknik analisis *Location Quotient*.

2.6.1. Teknik Analisis *Shift Share Klasik*

Teknik analisis *Shift Share Klasik* yaitu suatu teknik analisis dengan perencanaan pembangunan yang menganalisis bagaimana pangsa masing-masing sektor dalam perekonomian daerah tumbuh dari tahun ketahun terhadap perekonomian secara nasional, dengan cara membandingkan kinerja dan sektor ekonomi di daerah dengan kinerja dan sektor ekonomi nasional. Teknik *Shift Share* ini membandingkan laju pertumbuhan sektor-sektor perekonomian di suatu daerah dengan laju pertumbuhan sektor perekonomian secara nasional.

Melihat perbandingan laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi daerah dan secara nasional akan dapat dilihat adanya pergeseran (*Shift*) sektor perekonomian daerah sekaligus melihat bila daerah ini memperoleh pertumbuhan dan kemajuan sesuai dengan kedudukannya dalam perekonomian nasional. Teknik Analisis *Shift Share* ini membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu variable wilayah, yaitu pendapatan atau output sektor-sektor ekonomi daerah dalam waktu tertentu. Pertumbuhan nasional (N) merupakan kenaikan GNP secara nasional tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi. Bauran industri (M) atau *shift propotional (P-Shift)* merupakan suatu jumlah pertumbuhan industri dari tingkat pertumbuhan produksi regional karena tingginya konsentrasi industri/sektor regional. Bila P-

Shift bernilai positif maka pada tingkat regional sektor tumbuh relatif cepat, sebaliknya bila *P-Shift* nilainya negatif maka berarti pada tingkat regional sektor tersebut tumbuh lebih lambat. Bauran kompetitif (C) atau *Shift Differensial (D-Shift)* merupakan jumlah pertumbuhan suatu sektor di suatu daerah lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor yang sama di wilayah lain. Bila *D-Shift* bernilai positif maka sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah lain, sebaliknya jika *D-Shift* bernilai negatif maka sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah lain. Pengaruh keunggulan kompetitif disebut *Regional Share*. Karena itu analisis ini disebut Teknik Analisis *Shift Share*.

Bentuk umumnya :

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C \dots\dots\dots(1)$$

(Prasetyo Supeno, 1993)

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah pendapatan persektor yang dinotasikan sebagai (Y).

$$D_{ij} = Y^*_{ij} - Y_{ij} \dots\dots\dots(2)$$

$$N_{ij} = Y_{ij} - m \dots\dots\dots(3)$$

$$M_{ij} = Y_{ij} (r_{in} - r_{in}) \dots\dots\dots(4)$$

$$C_{ij} = Y_{ij} (r_{in} - r_{in}) \dots\dots\dots(5)$$

Dimana r_{ij} , r_{in} , r_n mewakili laju pertumbuhan wilayah Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut :

$$r_{ij} = \frac{y^*_{ij} - Y_{ij}}{Y_{ij}} \dots\dots\dots (6)$$

$$r_{in} = \frac{y^*_{in} - Y_{in}}{Y_{in}} \dots\dots\dots (7)$$

$$r_n = \frac{y^*_{in} - Y_n}{Y_n} \dots\dots\dots (8)$$

Secara keseluruhan wilayah, persamaan untuk sektor i di wilayah j adalah :

$$D_{ij} = Y_{ij} r_n + Y_{ij} (r_{in} - r_n) + Y_{ij} (r_{ij} - r_{in}) \dots\dots\dots(9)$$

Keterangan :

D : Variabel wilayah

N : Pertumbuhan Yogyakarta

M : Bauran industri

C : Keunggulan kompetitif

Y_{ij} = Pendapatan disektor i wilayah j

Y_{in} = Pendapatan sektor i diwilayah Yogyakarta

$*$ = Pendapatan tahun akhir analisis

Persamaan *Shift Share* ini menyebabkan laju pertumbuhan tertentu di wilayah setara dengan laju pertumbuhan yang dicapai perekonomian wilayah Yogyakarta selama kurun waktu analisis.

Pada persamaan $N_{ij} = Y_{ij} * r_n$ menunjukkan bahwa semua sektor dalam suatu wilayah hendaknya tumbuh sama dengan laju pertumbuhan wilayah Yogyakarta yaitu, r_n .

Pengaruh bauran industri untuk sektor tertentu positif ($r_{ij} > r_n$) artinya pertumbuhan pendapatan (variabel) untuk sektor tertentu lebih besar dari pada pendapatan sektor tertentu di wilayah Yogyakarta. Serta apabila negatif ($r_{ij} < r_n$) artinya pendapatan sektor tertentu di wilayah lebih kecil dari pendapatan sektor tertentu di wilayah Yogyakarta.

Bila semua komponen (pengaruh *Shift Share*) dijumlahkan untuk semua sektor, tanda hasil penjumlahan itu menunjukkan arah perubahan dalam pangsa wilayah dalam pendapatan wilayah Yogyakarta. Pengaruh bauran industri total positif (negatif) di suatu wilayah menunjukkan proporsi pendapatan tumbuh lebih cepat (lambat) di wilayah Yogyakarta. Demikian pula pengaruh keunggulan kompetitif total positif (negatif) di suatu wilayah menunjukkan pertumbuhan pendapatan di wilayah Yogyakarta lebih cepat/lambat.

Kelemahan analisis *Shift Share* ini secara teritorial antara lain :

1. Tidak lebih dari suatu teknik untuk mengurangi pertumbuhan variabel wilayah menjadi komponen-komponen.
2. Sederhananya komponen pertumbuhan wilayah Yogyakarta.
3. Tidak dikembangkannya arti ekonomi oleh komponen *Shift Share*.

Sedangkan kelemahan empiriknya adalah sebagai berikut :

1. Masalah pengaruh-pengaruh yang saling terkait.
2. Tidak ada penjelasan tentang perubahan dalam struktur ekonomi regional selama periode analisis.

2.6.2. Analisis *Location Quotient*

Kegiatan ekonomi suatu daerah dalam teknik analisis *Location Quotient* dibagi menjadi dua golongan yaitu :

1. Kegiatan ekonomi yang melayani pasar dalam daerah itu sendiri maupun pasar diluar daerah yang bersangkutan.

Kegiatan ekonomi seperti ini dinamakan kegiatan ekonomi basis (*basic industry*).

2. Kegiatan ekonomi yang hanya melayani pasar di daerah itu sendiri. Kegiatan ekonomi seperti ini dinamakan industri lokal (*non basic industry*).

Dasar pemikiran penggunaan teknik ini adalah teori ekonomi dasar yang intinya adalah karena sektor ekonomi basis itu menghasilkan barang dan jasa baik untuk pasar di daerah itu sendiri maupun pasar di luar daerah yang bersangkutan, maka pendapatan ke dalam daerah itu mendatangkan arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan kenaikan konsumsi, dan investasi dari daerah tersebut pada gilirannya dapat menaikkan dan menciptakan kesempatan kerja. Kenaikan pendapatan di daerah tidak saja menaikkan permintaan terhadap industri

basis melainkan juga permintaan terhadap sektor non basis atau industri lokal. Kenaikan pendapatan ini mendorong kenaikan investasi pada industri lokal, sehingga investasi modal dalam sektor industri lokal maupun investasi yang didorong (*induced*) sebagai akibat dari kenaikan industri non basis.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka sektor ekonomi basislah yang patut dikembangkan di suatu daerah. Oleh karena itu tugas pertama yang kita lakukan adalah menggolongkan tiap kegiatan ekonomi di suatu daerah apakah termasuk sektor basis atau sektor non basis (industri lokal). Untuk keperluan ini maka digunakan analisis *Location Quotient*.

Teknik analisis *Location Quotient* merupakan salah satu teknik analisis dalam perencanaan pembangunan yang digunakan untuk menganalisis sektor potensial atau sektor basis dalam perekonomian suatu daerah dengan cara mengukur konsentrasi suatu sektor ekonomi, yaitu dengan membandingkan peran sektor dalam perekonomian suatu daerah dengan sektor sejenis dalam perekonomian secara nasional. Rumus menghitung dengan teknik analisis *Location Quotient*

(Lincoln Arsyad, 1993).

$$LQ = \frac{y_i / y_t}{Y_i / Y_t}$$

Keterangan :

LQ : Koefisien LQ

y_i : Pendapatan disektor Ekonomi Daerah

y_t : Pendapatan Total Daerah (PDRB)

Y_i : Pendapatan disektor Ekonomi Nasional

Y_t : Pendapatan Total Ekonomi Nasional

Klasifikasi LQ :

$LQ > 1$ Merupakan sektor basis dan kemampuan produksi sektor tersebut di suatu daerah lebih besar bila dibandingkan dengan sektor sejenis secara nasional.

$LQ = 1$ Kemampuan produksi sektor tersebut sama dengan sektor sejenis secara nasional.

$LQ < 1$ Bukan merupakan sektor basis dan kemampuan produksi sektor tersebut lebih kecil bila dibandingkan sektor sejenis secara nasional.

Penelitian ini menggunakan asumsi sebagai berikut :

1. Selera dan pola pengeluaran di suatu daerah dengan daerah lain di Indonesia adalah sama.
2. Setiap penduduk di suatu daerah mempunyai pola permintaan terhadap suatu barang dan jasa sama dengan pola permintaan barang dan jasa pada tingkat nasional.
3. Tingkat konsumsi rata-rata untuk masing-masing barang dan jasa di setiap daerah adalah sama.

Bab III

KAJIAN PUSTAKA

3.1. Deskripsi

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tiap daerah merupakan indikator yang sangat mendukung bagi meningkatnya pendapatan nasional. Tingkat pertumbuhan PDRB yang berbeda-beda di setiap daerah propinsi menunjukkan adanya corak pembangunan yang dilakukan di masing-masing propinsi. Untuk mewujudkan agar tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat terealisasi dengan baik, maka setiap propinsi harus mengoptimalkan semua potensi yang ada dan juga diperlukan peran besar pemerintah yang mampu mendukung pembangunan.

Beberapa penelitian yang telah ada akan disajikan di bawah ini, guna menunjang dan mengetahui sejauh mana penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi sektoral masing-masing propinsi di Indonesia dapat bermanfaat bagi perekonomian nasional.

3.2. Tinjauan Penelitian Sebelumnya

3.2.1. Penelitian Pertama

Penelitian tentang pertumbuhan ekonomi sektoral sebelumnya pernah dilakukan pada tahun 1998 oleh Yani Karyani, judul skripsinya adalah “ Analisis Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Perekonomian Propinsi Jawa Tengah”. Dengan menggunakan analisis Shift Share dan analisis

Location Quotient, penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh pertumbuhan ekonomi sektoral yang dialami oleh Propinsi Jawa Tengah selama periode 1986-1995, apakah yang menjadi basis ekonomi yang diandalkan bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan bagaimana pergeseran atau perubahan struktur perekonomian Jawa Tengah selama periode 1986-1995. Berdasarkan penelitian Shift Share 1986-1995, menunjukkan bahwa total laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Propinsi Jawa Tengah adalah positif. Demikian juga jika dilihat dari pengaruh komponen pertumbuhan nasional (Nij), pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Jawa Tengah juga menunjukkan nilai positif, artinya kontribusi sektor ekonomi Propinsi Jawa Tengah pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan kontribusi sektor ekonomi sejenis secara nasional. Berdasarkan potensi yang dimiliki ekonomi daerah, dengan menggunakan alat analisis *Location Quotient* (LQ) terhadap sembilan sektor lapangan usaha kegiatan di Propinsi Jawa Tengah, dapat disimpulkan bahwa sektor yang dapat diandalkan dalam pertumbuhan PDRB selama periode 1986-1995 didominasi oleh sektor pertaaian, industri pengolahan, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan nilai LQ lebih besar dari 1 ($LQ > 1$). Selama periode analisis *Location Quotient* tampak adanya perubahan struktur dalam perekonomian Jawa Tengah, jika sebelumnya sektor pertanian merupakan sektor kontribusinya terhadap pertumbuhan PDRB Jawa Tengah yang paling besar, maka dewasa ini sektor industri pengolahanlah yang mempunyai peranan atau kontribusi terbesar dalam

pertumbuhan PDRB Propinsi Jawa Tengah, atau disebut *Leading Sector* (sektor pemimpin). Sedangkan sektor-sektor lain meskipun kontribusinya kecil tetapi mempunyai potensi cukup besar untuk tumbuh dan berkembang dimasa yang akan datang.

3.2.2. Penelitian Kedua

Penelitian yang berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hermanto pada tahun 2000, dengan judul skripsinya “ Analisis Spesialisasi Regional Propinsi Kalimantan Tengah”. Menurut hasil penelitian Hermanto dengan menggunakan analisis Shift Share Klasik, dan Location Quotient. Hasil analisis shift share klasik adalah sektor bangunan, perdagangan, transportasi dan jasa. Sedangkan pengaruh dari keunggulan kompetitif yang tidak setara dengan perubahan nasional adalah sektor pertambangan, industri, listrik, bangunan dan keuangan. Dengan analisis LQ dapat diketahui spesialisasi sektor di Kalimantan Tengah yaitu sektor pertanian dan pertambangan, sedangkan sektor lainnya nilai LQ-nya < 1 (rendah) sehingga tidak terdapat spesialisasi.

Sektor yang menjadi andalan untuk Propinsi Kalimantan Tengah yaitu sektor pertanian dan pertambangan karena nilai $LQ > 1$ sedangkan untuk sektor yang lainnya pertumbuhannya lebih lambat bila dibandingkan sektor pertanian dan pertambangan.

Bab IV

Kondisi Geografis dan Pembagian Wilayah

4.1. Letak Geografis

Kabupaten Sleman merupakan salah satu dari empat Kabupaten yang terdapat di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, secara geografis Kabupaten Sleman terletak terletak antara $107^{\circ} 15' 03''$ dan $100^{\circ} 29' 30''$ BT dan $7^{\circ} 34' 51''$ dan $7^{\circ} 47' 03''$ LS. Wilayah Kabupaten Sleman berketinggian antara 100 – 2500 meter dari permukaan air laut. Secara administratif Kabupaten Sleman dibatasi oleh:

1. Utara berbatasan dengan daerah Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah
2. Timur berbatasan dengan daerah Kabupaten Bantul dan Kotamadya Yogyakarta
3. Berbatasan dengan daerah Kulonprogo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah.

4.1.1. Pembagian Wilayah

Wilayah dibagian selatan merupakan dataran rendah yang subur, sedang bagian utara sebagian besar tanah merupakan tanah kering berupa ladang dan pekarangan, serta memiliki permukaan yang agak miring keselatan dengan batas paling utara adalah Gunung Merapi terdapat dua bukit yaitu Bukit Turgo dan Bukit Plawangan yang

merupakan bagian dari kawasan Wisata Kaliurang. Beberapa sungai yang melalui Kabupaten Sleman menuju Pantai Selatan antara lain: Sungai Progo, Krasak, Sempor, Nyono, Kuning, Boyong dan sungai lainnya.

Wilayah Kabupaten Sleman mempunyai areal seluas 574,82 km² terdiri dari 17 Kecamatan dengan 86 Kelurahan yang dibentuk dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 140-263 tahun 1981 tentang pembentukan Kelurahan-Kelurahan di Kabupaten Sleman, dan memiliki 2886 Rukun Warga, 6961 Rukun Tetangga. Kepadatan Penduduk Kabupaten Sleman cukup tinggi dan selalu meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 1997 kepadatan penduduk Kabupaten Sleman adalah 819.800 penduduk per km², tahun 1998 menjadi 828.960 penduduk per km², dan tahun 1999 menjadi 838.628 penduduk per km².

Jumlah Kecamatan di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Pembagian Wilayah Menurut Kecamatan, Kelurahan, Luas Daerah, Kepadatan per km² penduduk
di Kabupaten Sleman

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas (km ²)	Penduduk	Kepadatan Per Km ²
1	2	3	4	5	6
1	Moyudan	Sumberrahayu	6,31	6.710	1.063
		Sumbersari	5,46	7.802	1.429
		Sumberagung	8,20	11.572	1.411
		Sumberarum	7,65	7.035	920
2	Minggir	Sendangmulyo	6,70	7.092	1.059
		Sendangarum	3,45	4.073	1.181
		Sendangrejo	5,98	9.123	1.526
		Sendangsari	4,58	5.376	1.174
		Sendangagung	6,56	8.613	1.313
3	Sayegan	Margoluwih	5,00	8.064	1.613
		Margodadi	6,11	7.943	1.300
		Margomulyo	5,19	9.830	1.904
		Margoagung	5,18	8.876	1.714
		Margokaton	5,15	7.003	1.360
4	Godean	Sidorejo	5,44	7.088	1.303
		Sidoluhur	5,19	9.437	1.818
		Sidomulyo	2,50	5.767	2.307
		Sidoagung	3,32	7.172	2.160
		Sidokarto	3,64	9.126	2.507
		Sidoarum	3,73	10.967	2.940
5	Gamping	Sidomoyo	3,02	6.582	2.179
		Balecatur	9,86	12.198	1.237
		Ambarketawang	6,28	14.510	2.311

1	2	3	4	5	6
6	Mlati	Banyuraden	4,00	9.842	2.461
		Nogotirto	3,49	11.557	0,29
		Trihanggo	5,62	11.572	2.059
		Tirtoadi	4,97	7.564	1.522
		Sumberadi	6,00	10.561	1.760
		Tlogoadi	4,82	8.569	1.778
		Sendangadi	5,36	10.228	1.908
7	Depok	Sinduadi	7,37	23.326	3.165
		Catur Tunggal	11,04	52.251	4.733
		Maguwoharjo	15,01	22.807	1.519
8	Berbah	Condong Catur	9,50	30.515	3.212
		Sendangtirto	5,22	11.744	2.250
9	Prambanan	Tegaltirto	5,72	8.576	1.499
		Jogotirto	5,84	9.040	1.548
		Kalitirto	6,21	10.305	1.659
		Sumberharjo	9,17	11.348	1.238
		Wukirharjo	4,75	2.348	494
		Gayamharjo	6,55	4.408	673
		Sambirejo	8,39	4.657	555
10	Kalasan	Madurejo	7,09	11.502	1.622
		Bokoharjo	5,40	9.285	1.719
		Purwomartani	12,05	18.866	1.566
		Tirtomartani	7,53	12.248	1.527
11	Ngemplak	Tamanmartani	7,30	12.830	1.758
		Selomartani	8,96	10.080	1.125
		Wedomartani	12,44	16.455	1.323
		Umbulmartani	6,66	6.764	1.016

1	2	3	4	5	6
12	Ngaglik	Widodomartani	6,15	6.931	1.127
		Bimomartani	6,02	6.380	1.060
		Sindumartani	4,44	6.928	1.560
		Sariharjo	6,89	9.712	1.410
		Minomartani	1,53	11.829	7.731
		Sinduharjo	6,60	11.221	1.700
		Sukoharjo	8,03	9.329	1.162
		Sardonoharjo	9,38	13.242	1.412
13	Sleman	Donoharjo	6,09	6.688	1.098
		Caturharje	7,44	12.378	1.664
		Triharjo	5,78	13.902	2.405
		Tridadi	5,04	11.425	2.267
		Pendowoharjo	7,27	8.929	1.228
14	Turi	Trimulyo	5,79	7.901	1.368
		Bangunkarto	7,03	8.190	1.165
		Donokerto	7,41	8.471	1.143
		Girikerto	13,07	7.208	551
15	Tempel	Wonokerto	15,58	8.112	521
		Banyurejo	4,82	7.426	1.541
		Tambakrejo	3,26	4.640	1.423
		Sumberrejo	2,97	4.205	1.440
		Pondokrejo	3,27	2.151	1.575
		Mojorejo	3,37	4.712	1.398
		Margorejo	5,39	8.239	1.529
		Lumbangrejo	3,33	5.472	1.643
16	Pakem	Merdikorejo	6,13	5.557	907
		Purwobinangun	13,48	7.984	592

1	2	3	4	5	6
17	Cangkringan	Candibangun	6,36	4.646	731
		Harjobinangun	5,52	5.032	912
		Pakembinangun	4,18	5.527	1.322
		Hargobinangun	14,30	6.910	4.83
		Wukirsari	14,56	9.277	637
		Argomulyo	8,47	7.302	862
		Glagahharjo	7,95	3.256	410
		Kepuhharjo	8,75	2.494	285
		Umbulharjo	8,26	3.686	444

Sumber BPS Kabupaten Sleman

Jumlah dari masing-masing yang disebutkan diatas adalah terdapat 17 Kecamatan, 86 Kelurahan dengan luas daerah seluruhnya adalah 574,82 km², selain itu jumlah penduduk 833.628 dan kepadatan penduduk per km² 1.441.

4.1.2. Kondisi Kependudukan Kabupaten Sleman

1. Penduduk

Penduduk merupakan unsur yang penting dalam kegiatan ekonomi untuk membangun suatu perekonomian. Terutama dalam usaha meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi, karena dapat menyediakan tenaga kerja, tenaga beli, pemimpin perusahaan dan usahawan yang diperlukan untuk menciptakan suatu kegiatan ekonomi. Jumlah penduduk yang besar

tentu saja akan menjadi modal utama, bilamana dilengkapi serta berada dalam usia yang produktif.

Pada tahun 1995 penduduk Kabupaten Sleman sebesar 808.524 jiwa, kemudian pada tahun 1999 meningkat menjadi 438.628 jiwa. Bila dilihat dari masing-masing Kecamatan, maka Kecamatan Sleman merupakan no 5 dari 17 Kecamatan yang dilihat dari kepadatan penduduk per km² sebesar 1.741 jiwa/km².

Kepadatan penduduk terbesar berada di Kecamatan Depok yaitu sebesar 2.970 jiwa/km² dan terkecil berada pada Kecamatan Cankringan yaitu sebesar 542 jiwa/km². Jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Tabel 4.2.

2. Ketenaga kerjaan

Jumlah tenaga kerja / penduduk yang berumur 10 tahun keatas di Kabupaten Sleman. berdasarkan proyeksi tahun 1999 adalah angkatan kerja, dalam kelompok yang bekerja terdapat diantaranya tenaga kerja yang bekerja di Luar Negeri, seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Arab Saudi, dan Korea. Di Kabupaten Sleman jumlah tenaga kerja yang bekerja di Luar Negeri tahun 1998/1999 tercatat sebanyak 23.924 jiwa yang terdiri dari 3.820 jiwa laki-laki dan 20.104 jiwa perempuan.

3. Keluarga Berencana

Sebagai upaya untuk mengendalikan jumlah penduduk, Pemerintah melancarkan program KB. Program ini disamping untuk menekan ledakan jumlah penduduk, juga dimaksudkan sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Jumlah pasangan usia subur (PUS) yang merupakan salah satu sasaran program KB pada tahun 2001 tercatat sebanyak 126.019 pasangan. Mereka tersebar pada 17 Kecamatan dengan jumlah terbesar di Kecamatan Depok sebanyak 13.905 , disusul Kecamatan Gamping 11.679 pasangan dan Kecamatan Mlati sebanyak 10.619 pasangan. Kecamatan yang memiliki PUS relatif kecil adalah Minggir sebanyak 3789 pasangan dan beberapa Kecamatan lainnya seperti Moyudan, Turi, Cangkringan, dan Pakem yang masing-masing sekitar 4.300 s/d 4.800 pasangan.

Jumlah peserta KB aktif Kabupaten Sleman pada tahun 2000 tercatat sebanyak 99.850 pasangan. Sebagian besar mereka lebih menyukai atau memilih alat KB berupa IUD (spiral) yakni sebanyak 39.573 orang(39,63%), kemudian KB suntik sebanyak 31.810 orang (31,86%). Sedangkan alat KB yang relatif kecil penggunaannya adalah Medis Operasi Pria (MOP).

Tabel 4.2
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Sleman dirinci Menurut Kecamatan Pada tahun 1999

Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/ km ²)
Moyudan	27,62	33.119	1.199
Minggir	27,27	34.277	1.257
Sayegan	26,63	41.766	1.568
Godean	26,84	56.139	2.092
Gamping	29,25	64.396	2.202
Mlati	28,52	65.105	2.283
Depok	35,55	105.573	2.970
Berbah	22,99	34.665	1.725
Prambanan	41,35	43.548	1.053
Kalasan	35,84	54.024	1.507
Ngemplak	35,71	43.458	1.217
Ngaglik	38,52	62.021	1.610
Sleman	31,32	54.535	1.741
Tempel	32,49	45.402	1.397
Turi	43,09	31.981	742
Pakem	43,84	30.099	687
Cangkringan	47,99	25.995	542

Sumber BPS Kabupaten Sleman

4.2. Visi dan Misi Kabupaten Sleman

Visi dan misi Kabupaten Sleman yang merupakan pola dasar Kabupaten Sleman dapat dilihat pada keterangan di bawah ini :

4.2.1. Visi Kabupaten Sleman

Visi Kabupaten Sleman adalah terwujudnya masyarakat Sleman yang damai, demokrasi, berkeadilan, mandiri, keterbukaan, sadar hukum, dan lingkungan, berakhlak mulia, beretos kerja dan disiplin yang tinggi, maju dan sejahtera lahir batin berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

4.2.2. Misi Kabupaten Sleman

Untuk mewujudkan masa depan Kabupaten Sleman, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.
2. Penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan.
3. Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keamanan, ketaqwaan dan akhlak mulia serta mantapnya persaudaraan umat beragama yang rukun dan damai.
4. Terjaminnya kondisi keamanan, ketertiban dan kedamaian bagi masyarakat.

5. Menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran dalam rangka mewujudkan wibawa hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.
6. Terwujudnya kehidupan sosial budaya yang berkepribadian dinamis, kreatif dan tahan terhadap pengaruh globalisasi.
7. Pemberdayaan masyarakat dari seluruh kegiatan ekonomi daerah, terutama masyarakat petani, peternak, nelayan, pengusaha kecil dan menengah, serta koperasi sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya manusia yang produktif, maju, mandiri, berdaya saing tinggi dan berwawasan lingkungan.
8. Perwujudan dampak otonomi daerah yang luas dan nyata dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.
9. Perwujudan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.
10. Terwujudnya aparatur pemerintahan yang berfungsi melayani masyarakat, berdaya guna, produktif, transparan dan bebas dari KKN.
11. Terwujudnya iklim pendidikan yang demokratis dan bermutu serta dapat memenuhi kebutuhan guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, cerdas, sehat, disiplin dan bertanggung jawab,

terampil dan dapat mengisi kebutuhan pasar tenaga kerja dalam rangka mengembangkan kualitas SDM.

4.3 Kondisi Perekonomian Sleman

1. Sektor Pertanian

Sektor pertanian mencakup segala perusahaan yang didapat dari alam dan merupakan benda atau barang biologis (hidup). Termasuk ke dalam kelompok ini adalah sub sektor tanaman pangan yang meliputi segala kegiatan yang menghasilkan komoditi bahan makanan, sub sektor perkebunan yang diusahakan baik oleh rakyat maupun perusahaan perkebunan, sub sektor peternakan yang meliputi semua kegiatan pembibitan dan budidaya segala jenis unggas dan ternak dengan tujuan untuk dikembangkan, dibesarkan, dipotong dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan oleh rakyat maupun perusahaan peternakan. Sub sektor kehutanan meliputi semua kegiatan penebangan, penanaman, pengelolaan, pemeliharaan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta dan rakyat.

2. Sektor Pertambangan dan Galian

Kegiatan pertambangan dan penggalian adalah kegiatan yang mencakup penggalian, pengeboran, penyaringan, pencucian, pemilihan dan pengambilan segala macam barang tambang, mineral dan barang galian yang tersedia di alam, baik berupa benda padat, cair maupun gas.

Penambangan dan penggalian ini dapat dilakukan di bawah tanah maupun di atas permukaan bumi. Sifat dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan nilai guna barang tambang dan galian sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan, dijual atau diproses lebih lanjut.

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam sektor pertambangan dan penggalian dapat dikelompokkan menjadi tiga sub sektor yaitu pertambangan tanpa migas dan penggalian. Dari ketiga sub sektor di atas hanya sub sektor penggalian yang terdapat di Kabupaten Sleman.

3. Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan dibedakan menjadi dua sub sektor industri migas dan sub sektor industri non migas. Untuk industri migas terdiri dari pengilangan minyak bumi dan gas alam cair. Untuk Kabupaten Sleman, hanya terdapat industri tanpa migas yang dalam pengelolaannya dikelompokkan menjadi industri besar, sedang, kecil dan rumah tangga.

Penomoran jenis kegiatan industri adalah sesuai dengan total input-output tahun 1990 sehingga kode Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) yang dinilai dengan angka 3 termasuk dalam kelompok sektor industri. Jenis kegiatan utama yang dihasilkan dapat dikelompokkan dalam sembilan klasifikasi, yaitu :

- (31) Industri makanan, minuman dan tembakau
- (32) Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit
- (33) Industri kayu, rotan dan perabot rumah tangga

- (34) Industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan dan penerbitan
- (35) Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia, minyak, batu bara, karet dan plastik
- (36) Industri barang-barang galian non migas, kecuali minyak bumi dan batu bara
- (37) Industri logam dasar
- (38) Industri barang-barang dari logam, mesin dan peralatan
- (39) Industri pengolahan lainnya.

Jenis klasifikasi industri logam dasar tidak terdapat di Kabupaten Sleman.

4. Sektor Listrik Gas dan Air Minum

Sektor listrik, gas dan air bersih ini terdiri dari tiga sub sektor listrik, sub sektor gas kota, dan sub sektor air bersih.

Sub listrik mencakup pembangkit dan penyaluran tenaga listrik negara maupun perusahaan non PLN, seperti pembangkit listrik oleh perusahaan pemerintah daerah dan listrik yang diusahakan oleh swasta (perorangan dan perusahaan) dengan tujuan untuk dijual, dipakai sendiri, hilang dari transmisi dan listrik yang dicuri.

Sub sektor air bersih mencakup proses pembersihan, pemurnian dan proses kimiawi lainnya untuk menghasilkan air minum serta pendistribusian

dan penyaluran langsung melalui pipa dan alat lain ke rumah tangga, instansi pemerintah ataupun swasta.

5. Sektor Bangunan

Bangunan adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana lainnya. Pada umumnya kegiatan sektor bangunan terdiri dari berbagai kegiatan. Ragam kegiatan meliputi pemboran, pembangunan, pemasangan dan perbaikan semua jenis konstruksi.

Pembangunan ini dilaksanakan secara berencana dan terpola dengan memperhatikan rencana umum tata ruang, pertumbuhan penduduk, lingkungan usaha, dan lingkungan kerja. Perhatian khusus perlu diberikan pada peningkatan sarana dan prasarana yang layak, sehingga dapat terwujud keserasian kehidupan masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor perdagangan terdiri dari tiga sub sektor, yaitu : perdagangan, hotel dan restoran. Sub sektor perdagangan meliputi kegiatan membeli dan menjual barang untuk tujuan penyaluran serta pendistribusian tanpa merubah sifat harga.

Perhitungan sub sektor perdagangan dikelompokkan dalam dua jenis kegiatan yaitu perdagangan besar dan eceran. Perdagangan besar mencakup kegiatan pembelian dan penjualan kembali oleh pedagang dari

produsen/importir ke pedagang besar lainnya, pedagang eceran, perusahaan dan lembaga yang tidak mencari untung. Sedangkan pedagang eceran mencakup kegiatan pedagang yang umumnya melayani konsumen perorangan dan rumah tangga.

Sub sektor hotel, mencakup kegiatan penyediaan akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan sebagai tempat penginapan, yang dimaksud akomodasi di sini adalah hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat lainnya yang digunakan untuk tempat menginap seperti losmen, hotel, dan lain sebagainya.

Sub sektor restoran mencakup usaha penyediaan makanan dan minuman jadi yang umumnya dikonsumsi di tempat penjualan.

7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor ini mencakup dua sub sektor, yaitu sub sektor pengangkutan dan telekomunikasi. Untuk sub sektor pengangkutan terdiri dari jasa angkutan rel, angkutan jalan raya, angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara serta jasa penunjang angkutan.

Di Kabupaten Sleman, tidak terdapat jasa angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan barang dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang

sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti terminal, parkir, pergudangan, stasiun, pelabuhan dan bandara.

Sub sektor komunikasi terdiri dari kegiatan pos atau giro dan jasa penunjang komunikasi. Pos atau giro mencakup kegiatan pembelian jasa kepada pos yang diusahakan oleh Perum Pos atau Giro. Jasa penunjang komunikasi meliputi kegiatan pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman berita melalui telegram, telepon, faksimili yang diusahakan oleh PT. Telkom dan Indosat. Sub sektor ini meliputi kegiatan seperti wesel, radio panggil, dan telepon seluler (ponsel).

8. Sektor, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Sektor Bank dan Lembaga keuangan lainnya disebut sebagai finansial karena secara umum kegiatan utamanya berhubungan dengan kegiatan pengelolaan keuangan yang berupa penarikan dana dari masyarakat maupun penyalurannya kembali. Secara garis besar sektor ini terdiri dari tiga kelompok kegiatan utama yaitu usaha perbankan, moneter, lembaga keuangan non bank. Jasa penunjang keuangan serta usaha persewaan bangunan dan tanah.

1) Sub Sektor Bank

Kegiatan yang dicakup sub sektor Bank adalah kegiatan yang memberikan jasa kepada pihak lain seperti menerima simpanan terutama dalam bentuk giro, deposito, memberikan kredit atau simpanan baik kredit jangka pendek, menengah, panjang, mengirim uang, membeli dan

menjual surat berharga, mendiskontokan surat wesel, kertas dagang, surat hutang dan sejenisnya, menyediakan tempat penyimpanan barang berharga dan lainnya.

Dilihat dari segi tujuannya, pemasaran bank dapat merupakan bank sentral, bank umum, bank devisa, bank pembangunan, bank tabungan dan bank desa. Sedangkan jika ditinjau dari segi kepentingannya dapat dikelompokkan dalam bank pemerintah, bank swasta nasional dan bank asing serta jika ditinjau dari segi penciptaan uang giral dan uang kartal dikenal dua jenis bank yaitu bank primer dan bank sekunder, yaitu :

- a. Bank Primer adalah bank yang dapat menciptakan uang giral dan uang kartal, dan yang tergolong dalam bentuk bank primer yaitu bank sentral (yang dapat menciptakan kredit dalam bentuk uang kertas dan logam).
- b. Bank Sekunder adalah bank yang bertugas sebagai perantara dalam penyaluran kredit, yang tergolong dalam bank sekunder (bank pembangunan dan bank hipotik) yang tidak menciptakan uang giral.

2) Sub Sektor Lembaga Keuangan Non Bank

a. Usaha jasa asuransi

Asuransi adalah salah satu jenis yang merupakan lembaga keuangan non bank yang usahah pokoknya menanggung resiko-resiko atas terjadinya kerugian finansial sesuatu barang atau jiwa

manusia yang disebabkan oleh terjadinya musibah atau kecelakaan atas barang atau orang tersebut (termasuk tunjangan hari tua), sehingga mengakibatkan kematian. Jasa asuransi ini dapat dibedakan menjadi asuransi jiwa, asuransi sosial serta asuransi kerugian (termasuk disini per-asuransian atau broker, jasa pelayanan penanggungan per-asuransian, unit asuransi dana kerugian yang berdiri sendiri, adjuster dan sejenisnya).

Asuransi jiwa adalah suatu per-asuransian yang khusus menanggung resiko kematian, kecelakaan atau sakit, termasuk juga jaminan hari tua masa depan pihak tergantung dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian.

Asuransi kerugian adalah usaha per-asuransian yang khusus menanggung resiko kerugian, kehilangan atau kerusakan harta milik atau benda termasuk juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi terhadap harta benda atau harta milik tertanggung yang besarnya telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam perjanjian.

Asuransi sosial adalah usaha per-asuransian yang mencakup usaha asuransi jiwa dan bukan jiwa (kerugian) yang dibentuk pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh atau golongan

masyarakat untuk tujuan sosial. Pihak asuransi akan menerima atau menanggung sejumlah iuran atau sumbangan wajib dari masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan umum seperti : jasa angkutan, jasa kesehatan, jasa pelayanan terhadap pemilik kendaraan bermotor dan pelayanan hari tua.

b. Dana pensiun

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, yang dikelompokkan dalam dua bentuk program pensiun, yaitu :

1. Program Pensiun Manfaat Pasti, yaitu program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lainnya yang bukan program pensiunan iuran pasti.
2. Program Pensiunan Iuran Pasti, yaitu program pensiun yang iuranya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangan dibukukan pada masing-masing rekening peserta sebagai manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pensiun dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Manfaat pensiun terdiri dari manfaat pensiun normal, manfaat pensiun dipercepat, manfaat pensiun cacat dan manfaat

pensiun ditunda. Jenis dana pensiun dibedakan menjadi dua, yaitu

- 1) Dana Pensiun Pemberian Kerja, dan
- 2) Dana Pensiun Lembaga Keuangan

c. Pegadaian

Mencakup usaha lembaga pemerintah yang bersifat monopoli dan dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang, yang tugasnya antara lain membina perekonomian rakyat kecil dengan penyaluran kredit atas dasar kukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, aman, dan hemat kepada para petani, nelayan, pedagang kecil yang bersifat produktif, kaum buruh atau pegawai negeri ekonomi lemah. Yang tujuannya tidak lain adalah untuk mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajib lainnya.

Kegiatan utamanya adalah memberikan pinjaman uang kepada golongan masyarakat dengan menerima jaminan barang bergerak. Besarnya pinjaman sesuai dengan nilai barang jaminan tanpa adanya syarat apapun mengenai penggunaan dananya.

d. Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan adalah badan urusan yang bergerak disektor keuangan dengan melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan cara tidak menanamkan dana secara langsung dari masyarakat. Pengelolaan

pembiayaan pembangunan diarahkan untuk dapat lebih menunjang pertumbuhan dan stabilisasi ekonomi. Lembaga pembiayaan ini mencakup kegiatan sewa usaha (leasing), modal Ventura, anjak piutang, kartu kredit dan pembiayaan konsumen.

3) Sektor Jasa Sub Penunjang Kerugian

mencakup kegiatan pedagang valuta asing, pasar modal, dan jasa penjaminannya. Untuk wilayah Kabupaten Sleman hanya terdapat jasa penunjan keuangan dalam hal ini adanya money changer.

4) Sub Sektor Bangunan

Usaha persewaan bangunan dan tanah, baik yang menyangkut bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal seperti perkantoran, pertokoan serta usaha persewaan persil.

5) Sub Sektor Jasa Perusahaan

mencakup pembelian jasa hukum (advokat dan notaris), jasa angkutan dan pembukuan, jasa pengelolaan dan penyajian data, jasa bangunan atau arsitek dan teknik, jasa periklanan dan riset pemasaran, jasa persewaan mesin dan peralatan. Sewa jasa ini biasanya diberikan berdasarkan sejumlah bayaran atau kontrak, seperti :

a. Jasa hukum (Advokat atau Pengacara, Notaris)

Advokat atau pengacara adalah ahli yang berwenang bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan, baik perkara pidana maupun perdata. Sedangkan notaris adalah orang

yang ditunjuk dan diberi kuasa (oleh Departemen Kehakiman) untuk mensyahkan dan menyaksikan pembuatan surat perjanjian, akte dan sebagainya.

b. Jasa akuntan dan pembukuan

Adalah usaha jasa pengurusan tata buku dan pemeriksaan pembukuan termasuk juga jasa pengolahan data dan tabulasi yang merupakan bagian dari jasa akuntansi dan pembukuan.

c. Jasa Pengolahan dan penyajian Data

Adalah usaha jasa pengolahan dan penyajian data yang bersifat umum baik secara elektronik maupun manual atas balas jasa atau kontrak, termasuk didalamnya adalah jasa komputer programing dan sebagainya yang ada hubungannya dengan kegiatan komputer.

d. Jasa Bangunan, Arsitek dan Teknik

Adalah jasa konsultasi bangunan arsitek atau perancang bangunan, jasa survei, geologi, penyelidikan tentang atau pencarian biji logam untuk pertambangan dan jasa penyelidikan sejenisnya.

e. Jasa Periklanan dan Riset pemasaran

Adalah suatu kegiatan usaha yang memberikan pelajaran kepada pihak lain (perusahaan atau perorangan) dalam bentuk pembuatan dan pemasaran iklan, yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, membujuk, dan meningkatkan konsumen tentang produk dari suatu perusahaan. Usaha dalam penyampaian dapat melalui berbagai

media massa seperti audio visual (televisi, video, film), studio radio, surat kabar atau majalah, poster dan lain sebagainya.

f. Jasa Penyewaan Mesin dan Peralatan

Adalah usaha persewaan mesin dan peralatan untuk keperluan pertanian, pertambangan, dan ladang minyak, industri pengolahan, konstruksi, penjualan dan mesin-mesin keperluan kantor.

9. Sektor Jasa-Jasa

1. Sub sektor jasa pemerintah umum

Sub sektor ini mencakup semua departemen dan non departemen, badan atau lembaga tinggi negara, kantor-kantor dan badan yang berhubungan dengan administrasi perkantoran.

2. Sub Sektor Jasa Swasta, meliputi :

a. Jasa Sosial Kemasyarakatan

Meliputi jasa pendidikan, kesehatan, penelitian, panti asuhan, yayasan rumah sakit, rumah ibadah, baik yang dikelola oleh pemerintah atau swasta.

b. Jasa Hiburan dan Rekreasi

Meliputi kegiatan dan distribusi film komersial dan dokumenter untuk kepentingan pemerintah, serta reproduksi film video, jasa bioskop, dan panggung hiburan, studio radio, perpustakaan, museum, taman hewan, kolam renang, studio televisi yang dikelola oleh swasta atau pemerintah.

3. Jasa Perorangan dan Rumah Tanga Meliputi :
 - a. Jasa pembengkelan dan reparasi kendaraan bermotor, mencakup perbaikan baik roda dua, tiga, empat, atau lebih.
 - b. Jasa reparasi lainnya seperti reparasi barang-barang elektronik antara lain televisi, lemari pendingin, jam, mesin jahit, dan barang-barang rumah tangga lainnya.
 - c. Jasa pembantu rumah tangga mencakup kuli, tukang kebun, dan penjaga keamanan.
 - d. Jasa perorangan lain mencakup tukang cukur, tukang jahit dan lain sebagainya.

BAB V

ANALISIS DATA

5.1. Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai penerbitan, seperti data yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan sumber-sumber lain yang terkait dengan obyek yang diteliti dimulai dari tahun 1993 hingga tahun 2001. Data-data tersebut adalah data pendapatan sektor-sektor ekonomi daerah yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman dari tahun 1993-2001 dan pendapatan sektor ekonomi yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1993-2001.

Data-data tersebut digunakan untuk menganalisis pertumbuhan dan potensi sembilan sektor ekonomi Kabupaten Sleman dibandingkan dengan sembilan sektor ekonomi pada tingkat nasional (Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Dalam penelitian ini digunakan dua analisis, yaitu analisis *Shift Share Klasik* dan analisis *Location Qoutient*. Pada analisis *Shift Share Klasik* data yang digunakan adalah data PDRB Kabupaten Sleman dan PDRB Propinsi D.I Yogyakarta menurut lapangan usaha/sektor ekonomi. Pada analisis *Shift Share Klasik* ini berarti membandingkan pertumbuhan sektor ekonomi pada

awal tahun analisis yaitu tahun 1993 dengan pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun analisis yaitu pada tahun 2001.

Pada analisis *Location Qoutiont*, data yang dipakai adalah data PDRB Kabupaten Sleman dan PDRB Propinsi D.I Yogyakarta menurut lapangan usaha/sector ekonomi selama 10 tahun yaitu sejak tahun 1993 sampai tahun 2001.

5.2. Kontribusi Kelompok Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta dan PDRB Kabupaten Sleman

Pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Sleman dan Propinsi D.I Yogyakarta secara menyeluruh tidak lepas dari dukungan berdasarkan kelompok sektor disamping dukungan secara sektoral yang tidak kalah pentingnya. Tingkat pertumbuhan masing-masing sektor dan kelompok sektor pun dalam perekonomian daerah dan nasional mengalami perubahan, baik itu perubahan berupa pertumbuhan maupun perubahan berupa potensi dari tahun ke tahun. Dari tabel berikut dilihat kontribusi peranan perekonomian menurut sektor ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Sleman

Tabel 5.1
Peranan Kelompok Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier
Terhadap PDRB Kabupaten Sleman
Tahun 1999-2001 (%)

Tahun	PDRB per Kapita Berlaku		PDRB per Kapita Konstan	
	Nilai	Pertumbuhan (%)	Nilai	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1999	3.753,6	16,23	1.580,9	0,43
2000	3.949,0	10,51	1.610,0	1,84
2001	4.502,1	14,01	1.649,9	2,48

Sumber: BPS Kabupaten Sleman

Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Sleman atas dasar harga berlaku selama tiga tahun terakhir ini menunjukkan angka yang signifikan. Pada tahun 1999 PDRB per Kapita Kabupaten Sleman sebesar Rp 3.573.625 dan pada tahun 2000 meningkat menjadi Rp 3.949.037 atau mengalami pertumbuhan positif sebesar 10,51 persen. Tahun 2001 PDRB per Kapita Kabupaten Sleman sebesar Rp 4.502.102 atau mengalami peningkatan sebesar 14,01 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya atau naik 3,50 poin dari peningkatan tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari nilai PDRB atas dasar harga konstan PDRB per Kapita Kabupaten Sleman tahun 2000 naik sebesar 1,84 persen, dan pada tahun 2001 mengalami peningkatan sedikit lebih tinggi sebesar 2,48 persen. Hal ini berarti kenaikan produksi secara riil sebanding dengan perkembangan jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk yang menikmati hasil produksi jika

diimbangi peningkatan produksi secara riil maka masing-masing penduduk akan seimbang.

5.2 Hasil Analisis *Shift Share*

Tabel 5.2
Hasil Analisis *Shift Share* Sektor Ekonomi
Kabupaten Sleman Tahun 1993-2001
(Milyar Rupiah)

No	Sektor Ekonomi	$n_j = \frac{Y^*_{jt} Y_{jt}}{Y_{jt}}$	$m_j = \frac{Y^*_{jt} Y_{jt}}{Y_{jt}}$	$n = \frac{Y^*_{jt} Y_{jt}}{Y_{jt}}$	Nij	Mij	Cij	Dij
1	Pertanian	0.074175337	0.267398346	0.277108734	197,504.7229	-1,917.8501	-38,162.5104	157,424.3625
2	Pertambangan&Penggalian	0.097715524	0.027788088	0.277108734	5,996.7229	-1,495.1759	419.3548	4,920.9018
3	Industri Pengolahan	0.253922584	0.324666285	0.277108734	197,063.7229	9,371.8812	-13,941.0367	192,494.5673
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.396720444	0.610471118	0.277108734	7,561.7229	2,520.8863	-1,616.3826	8,466.2266
5	Bangunan	-0.080075928	-0.023549609	0.277108734	168,052.7229	-50,526.5366	-9,499.4175	108,026.7688
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0.127805992	0.357740462	0.277108734	247,906.7229	19,989.1697	-57,002.3646	210,893.5280
7	Pengangkutan dan Komunikasi	-0.029522151	0.440135427	0.277108734	167,060.7229	27,235.4023	-78,461.4646	115,834.6607
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0.006455574	0.307649738	0.277108734	174,267.7229	5,322.3197	-52,488.5046	127,101.5380
9	Jasa-Jasa	0.044235818	0.249543448	0.277108734	250,633.7229	-6,908.7979	51,457.0725	192,267.8525

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan Kabupaten Sleman Tahun 1993-2001 diolah.

Keterangan :

Nij : Komponen pertumbuhan wilayah Yogyakarta

Mij : Komponen bauran industri

Cij : Komponen keunggulan kompetitif

Dij : Komponen pertumbuhan Sleman secara keseluruhan

I. Sektor Pertanian

Sektor pertanian Kabupaten Sleman berdasarkan analisis *Shift Share* tahun 1993-2001 dipengaruhi oleh beberapa komponen. Misalnya komponen pertumbuhan nasional (Nij), sektor pertanian Kabupaten Sleman mempunyai kontribusi yang positif yaitu sebesar 197,504.7229 milyar rupiah terhadap pertumbuhan nasional. Sedangkan pengaruh lainnya yaitu pengaruh komponen bauran industri (Mij) yang dalam hal ini mempunyai kontribusi sebesar -1,917.8501 milyar rupiah yang berarti bahwa sektor pertanian mempunyai kontribusi negatif atau pertumbuhannya lebih lambat terhadap kontribusi sektor sejenis secara nasional.

Pengaruh komponen keunggulan kompetitif (Cij), kontribusinya sebesar 38,162.5104 milyar rupiah yang berarti sektor pertanian mempunyai kontribusi yang positif atau pertumbuhannya lebih cepat terhadap pertumbuhan sektor jenis secara nasional.

Pengaruh komponen pertumbuhan secara keseluruhan (Dij) untuk sektor pertanian, Kabupaten Sleman mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan sektor sejenis secara nasional besar kontribusi sektor pertanian, yaitu sebesar 157,424.3625 milyar rupiah, hal ini menunjukkan bahwa sumbangan sektor tersebut positif terhadap sektor pertanian secara nasional.

2. Sektor Pertumbuhan dan Penggalan

Sektor pertambangan dan penggalan dipengaruhi oleh beberapa komponen. Pada komponen pertumbuhan nasional (N_{ij}) besarnya sumbangan sektor pertambangan dan penggalan adalah sebesar 5,996.7229 milyar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan sektor sejenis secara nasional. Pada pengaruh komponen bauran industri terhadap bauran industri (M_{ij}) diperoleh nilai sebesar -1,495.1759 milyar rupiah yang berarti bahwa sektor pertambangan dan penggalan ini memiliki pertumbuhan yang lebih lambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan sektor sejenis secara nasional atau $r_{in} < r_n$.

Besarnya pengaruh dari komponen keunggulan kompetitif (C_{ij}) yaitu sebesar 419.3548 milyar rupiah. Artinya bahwa pertumbuhan sektor ini lebih cepat dibandingkan pertumbuhan sektor sejenis secara nasional atau $r_{ij} > r_n$.

Pengaruh pertumbuhan keseluruhan (D_{ij}) untuk sektor pertambangan dan penggalan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan sektor ekonomi sejenis yang sebesar kontribusinya adalah 4,920.9018 milyar rupiah.

3. Sektor Industri Pengolahan

Hasil perhitungan untuk sektor industri pengeolahan tampak bahwa komponen bauran industri (M_{ij}) mempunyai nilai yang positif yaitu sebesar 9,371.8812 milyar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sektor industri dan pengolahan ini secara regional (terhadap PDRB) pertumbuhannya lebih cepat ($r_{in} > r_n$).

Pengaruh lainnya yaitu pengaruh dari komponen keunggulan kompetitif (C_{ij}), sektor industri pengolahan ini mempunyai nilai sebesar 13,941.0367 milyar rupiah. Hal ini berarti bahwa sektor industri pengolahan ini secara regional pertumbuhannya lebih cepat dari pertumbuhan sektor industri pengolahan secara nasional atau $r_{ij} > r_{in}$.

Pertumbuhan nasional (N_{ij}) sektor industri pengolahan ini mempunyai sumbangan yang positif yaitu sebesar 197,063.7229 milyar rupiah, terhadap pertumbuhan nasional. Begitu pula untuk komponen pertumbuhan regional secara keseluruhan (D_{ij}), sektor industri pengolahan ini mempunyai nilai yang positif sebesar 192,494.5673 milyar rupiah.

4. Sektor Listrik, Gas dan Air Minum

Sektor listrik, gas dan air minum Kabupaten Sleman berdasarkan analisis *Shift Share* tahun 1993-2001 dipengaruhi oleh beberapa komponen. Misalnya komponen pertumbuhan nasional (N_{ij}), sektor ini Kabupaten Sleman mempunyai kontribusi yang positif yaitu sebesar 7,561.7229 milyar rupiah terhadap pertumbuhan nasional. Sedangkan pengaruh lainnya yaitu

pengaruh komponen bauran industri (Mij) yang dalam hal ini mempunyai kontribusi sebesar 2,520.8863 milyar rupiah yang berarti bahwa sektor listrik, gas dan air minum ini mempunyai kontribusi yang positif atau pertumbuhannya lebih cepat terhadap kontribusi sektor sejenis secara nasional.

Pengaruh komponen keunggulan kompetitif (Cij), kontribusinya sebesar 1,616.3826 milyar rupiah yang berarti sektor listrik, gas dan air minum ini mempunyai kontribusi yang positif.

Pengaruh komponen pertumbuhan secara keseluruhan (Dij), maka sektor listrik, gas dan air minum Kabupaten Sleman mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan sektor sejenis secara nasional. Besarnya kontribusi sektor ini yaitu sebesar 8,446.2266 milyar rupiah, hal ini menunjukkan bahwa sumbangan sektor tersebut positif terhadap kontribusi sektor listrik, gas dan air minum secara nasional.

5. Sektor Bangunan

Sektor bangunan Kabupaten Sleman berdasarkan analisis *Shift Share* tahun 1993-2001 dipengaruhi oleh beberapa komponen, misalnya komponen pertumbuhan nasional (Nij), sektor bangunan ini mempunyai kontribusi yang positif yaitu sebesar 168,052.7229 milyar rupiah terhadap pertumbuhan nasional. Sedangkan pengaruh lainnya yaitu pengaruh komponen bauran industri (Mij) yang dalam hal ini mempunyai kontribusi sebesar -50,526.5366 milyar rupiah yang berarti bahwa sektor bangunan

mempunyai kontribusi yang negatif atau pertumbuhannya lebih lambat terhadap kontribusi sektor sejenis secara nasional.

Pengaruh komponen keunggulan kompetitif (Dij), kontribusinya sebesar 108,026.7688 milyar rupiah, yang berarti sektor bangunan mempunyai kontribusi yang positif atau pertumbuhannya lebih cepat terhadap pertumbuhan sektor sejenis secara nasional.

6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Menurut hasil perhitungan, untuk sektor perdagangan tampak komponen bauran industri (Mij) mempunyai nilai yang positif yaitu sebesar 19,989.1697 milyar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sektor perdagangan secara regional (terhadap PDRB) pertumbuhannya lebih cepat dari pada sumbangan sektor perdagangan ini secara nasional (terhadap PDB) atau $r_{in} < r_n$.

Pengaruh lainnya yaitu pengaruh dari komponen keunggulan kompetitif (Cij), sektor perdagangan ini secara regional pertumbuhannya lebih cepat dari pertumbuhan secara perdagangan secara nasional atau $r_{ij} > r_{in}$.

Komponen pertumbuhan nasional (Nij) sektor perdagangan ini mempunyai sumbangan yang positif terhadap pertumbuhan nasional yaitu sebesar 247,906.7229 milyar rupiah. Begitu pula untuk komponen pertumbuhan regional secara keseluruhan (Dij), sektor perdagangan ini mempunyai nilai yang positif sebesar 210,893.5280 milyar rupiah.

7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Menurut hasil perhutangan, untuk sektor pengangkutan dan komunikasi tampak bahwa komponen bauran industri (Mij) mempunyai nilai yang positif yaitu sebesar 27,235.4023 milyar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pengangkutan dan komunikasi ini secara regional (terhadap PDRB) pertumbuhannya lebih cepat dari pada sumbangan sektor sejenis secara nasional (terhadap PDI) atau $r_{in} > r_n$.

Pengaruh lainnya yaitu pengaruh dari komponen keunggulan kompetitif (Cij), sektor pengangkutan dan komunikasi ini mempunyai nilai yang positif sebesar 78,461.4646 milyar rupiah. Hal ini berarti bahwa sektor pengangkutan dan komunikasi ini secara regional pertumbuhannya lebih cepat dari pertumbuhan sektor angkutan dan komunikasi secara nasional, atau $r_{ij} > r_n$.

Pengaruh komponen pertumbuhan nasional (Nij), sektor pengangkutan dan komunikasi ini mempunyai sumbangan yang positif yaitu sebesar 167,060.7229 milyar rupiah terhadap pertumbuhan nasional. Begitu pula untuk komponen pertumbuhan regional secara keseluruhan (Dij), sektor pengangkutan dan komunikasi ini mempunyai nilai yang positif sebesar 115,834.6607 milyar rupiah.

8. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan Kabupaten Sleman berdasarkan analisis *Shift Share* tahun 1993-2001 dipengaruhi oleh

beberapa komponen, misalnya komponen pertumbuhan nasional (Nij), sektor keuangan, persewaan, dan jasa Kabupaten Sleman mempunyai kontribusi yang positif yaitu sebesar 174,267.7229 milyar rupiah terhadap pertumbuhan nasional. Sedangkan pengaruh lainnya yaitu pengaruh komponen bauran industri (Mij) yang dalam hal ini mempunyai kontribusi sebesar 5,322.3197 milyar rupiah, yang berarti bahwa sektor keuangan, persewaan, dan jasa ini mempunyai kontribusi yang positif atau pertumbuhannya lebih cepat terhadap kontribusi sektor sejenis secara nasional.

Pengaruh keunggulan kompetitif (Cij), kontribusi sektor ini yaitu sebesar 52,488.5046 milyar rupiah yang berarti bahwa sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan ini mempunyai kontribusi yang positif atau pertumbuhannya lebih cepat terhadap pertumbuhan sektor sejenis secara nasional. Untuk komponen pertumbuhan regional secara keseluruhan (Dij), sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan ini mempunyai nilai yang positif sebesar 127,101.5380 milyar rupiah.

9. Sektor Jasa-jasa

Menurut hasil perhitungan, untuk sektor jasa-jasa ini tampak bahwa pengaruh komponen bauran industri (Mij) mempunyai nilai yang negatif yaitu -6,908.7979 milyar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sektor jasa-jasa ini secara regional (terhadap PDRB) pertumbuhannya lebih lambat dari pada sumbangan sektor jasa-jasa secara nasional atau $r_{in} < r_n$.

Pengaruh lainnya yaitu pengaruh dari komponen keunggulan kompetitif (Cij), mempunyai nilai yang positif yaitu sebesar 51,457.0725 milyar rupiah. Hal ini berarti bahwa sektor jasa-jasa ini secara regional pertumbuhannya lebih cepat dari pada pertumbuhan sektor jasa-jasa secara nasional, atau $r_{ij} > r_{in}$.

Pengaruh komponen pertumbuhan nasional (Nij) sektor jasa-jasa ini mempunyai sumbangan yang positif yaitu sebesar 250,633.7229 milyar rupiah terhadap pertumbuhan nasional. Begitu pula untuk komponen pertumbuhan regional secara keseluruhan (Dij), sektor jasa-jasa ini mempunyai nilai yang positif sebesar 192,267.8552 milyar rupiah.

5.3. Hasil Analisis *Location Quotien*

Tabel 5.3
Hasil Analisis Location Quotien Sektor Ekonomi
Kabupaten Sleman Tahun 1993-2001
(Milyar Rupiah)

No	Sektor Ekonomi	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
1	Pertanian	0.79	0.90	1.01	1.02	0.97	0.80	0.79	0.79	0.82
2	Pertambangan & Penggalian	0.28	0.31	0.35	0.39	0.36	0.33	0.34	0.36	0.37
3	Industri Pengolahan	1.08	1.10	1.16	0.90	1.17	1.14	1.12	1.22	1.25
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.88	0.87	0.85	0.98	0.89	1.05	0.96	0.94	0.93
5	Bangunan	1.12	1.06	1.18	1.21	1.15	1.32	1.32	1.30	1.29
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.12	1.14	1.10	1.09	1.07	1.15	1.15	1.16	1.13
7	Pengangkutan dan Komunikasi	1.00	0.99	0.92	0.97	0.94	0.95	0.94	0.88	0.83
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.18	1.13	1.12	1.18	1.10	1.12	1.14	1.11	1.11
9	Jasa-Jasa	0.84	0.89	0.74	0.86	0.81	0.84	0.85	0.85	0.86

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sleman Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993-2001, diolah.

1. Potensi Sektor Pertanian

Berdasarkan analisis *Location Quotient* potensi sektor pertanian di Kabupaten Sleman selama kurun waktu 1993-2001 terus mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dan belum bisa menunjukkan hasil yang maksimum.

Hasil perhitungan pada tahun 1993 nilai LQ sektor pertanian sebesar 0.79 milyar rupiah, pada tahun 1994 nilai LQ sebesar 0.90. Pada tahun 1995 dan 1996 sektor pertanian ini mempunyai nilai LQ yang besar diantara angka 1.01-1.02 milyar rupiah, yang nilai LQ > 1 hal ini membuktikan bahwa pada tahun 1995 dan tahun 1996 sektor pertanian ini pernah menjadi sektor

potensial (basis) walaupun kenaikannya tidak begitu drastis. Sedangkan pada tahun 1997 nilai LQ sebesar 0,97 milyar rupiah yang berarti mengalami penurunan sebesar 0,05 milyar rupiah. Jadi dapat dikatakan bahwa sektor pertanian pada tahun 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 bukan merupakan sektor potensial (sektor basis) yang menjadi andalan bagi perekonomian Kabupaten Sleman, karena nilai LQ kurang dari satu ($LQ < 1$).

2. Potensi Sektor Pertambangan dan Penggalian

Berdasarkan analisis *Location Quotient*, potensi sektor pertambangan dan galian di Kabupaten Sleman selama kurun waktu 1993-2001 masih relatif kecil. Hal ini dikarenakan hanya sub sektor penggalian yang hanya terdapat di Kabupaten Sleman. Nilai LQ d. sektor ini pada tahun 1993 sebesar 0,28 milyar rupiah sedangkan pada tahun 1997 sebesar 0,36 milyar rupiah yang berarti terjadi kenaikan sebesar 0,08 milyar rupiah. Tetapi pada tahun-tahun berikutnya nilai LQ sektor ini terus berada di bawah angka 1 atau $LQ < 1$.

Hasil perhitungan pada tahun 2001 nilai LQ sektor pertambangan dan penggalian ini sebesar 0,37 milyar rupiah berarti ada penurunan 0,09 milyar rupiah dibandingkan pada tahun 1993 nilai LQ sebesar 0,28 milyar rupiah. Hal ini berarti pula bahwa sektor pertambangan dan penggalian ini bukan menjadi sektor potensial (sektor basis) bagi perekonomian Kabupaten Sleman.

3. Potensi Sektor Industri Pengolahan

Berdasarkan analisis *Location Quotient*, potensi sektor industri pengolahan di Kabupaten Sleman selama kurun waktu 1993-2001 relatif besar. Nilai LQ pada sektor ini selama tahun analisis dari tahun 1993-2001 mengalami kenaikan terus-menerus walaupun ada penurunan pada tahun 1996 dimana nilai LQ dibawah 1 yaitu sebesar 0,90. Hal ini berarti bahwa sektor industri pengolahan bisa dikategorikan sebagai sektor yang potensial dan dapat diandalkan (sektor basis) bagi pendapatan regional (PDRB) Kabupaten Sleman.

Berdasarkan hasil perhitungan, pada tahun 1993 nilai LQ sektor industri dan pengolahan ini sebesar 1,08 miliar rupiah , pada tahun 2001 nilai LQ sebesar 1,25 miliar rupiah, berarti ada peningkatan sebesar 0,17 miliar rupiah.

4. Potensi Sektor Listrik, Gas dan Air Minum

Berdasarkan analisis *Location Quotient*, potensi sektor listrik, gas dan air, minum di Kabupaten Sleman selama kurun waktu tahun 1993 sampai tahun 2001 nilai LQ-nya terus mengalami penurunan atau $LQ < 1$, yang berarti sektor tersebut bukan merupakan sektor basis atau andalan bagi perekonomian Kabupaten Sleman.

Hasil perhitungan pada tahun 1993 nilai LQ sektor listrik, gas dan air minum ini sebesar 0,88 milyar rupiah dan pada tahun 2001 nilai LQ

sebesar 0,93 milyar rupiah yang berarti terjadi penurunan sebesar 0,05 milyar rupiah.

5. Potensi Sektor Bangunan

Berdasarkan analisis *Location Quotient*, potensi sektor bangunan di Kabupaten Sleman selama kurun waktu 1993-2001 terus meningkat, dimana nilai LQ selalu berada diatas angka 1 atau $LQ > 1$ yang berarti bahwa sektor bangunan ini bisa menjadi sektor andalan atau sebagai sektor basis bagi perekonomian Kabupaten Sleman.

Hasil perhitungan pada tahun 1993 nilai LQ sektor bangunan ini sebesar 1,12 milyar rupiah dan pada tahun 1997 nilai LQ sebesar 1,15 milyar rupiah yang berarti terjadi kenaikan sebesar 0,03 milyar rupiah, tetapi pada tahun 2001 nilai LQ sebesar 1,29 milyar rupiah, tetapi kalau kita lihat dari hasil analisis *Location Quotient* dari sektor ini pada tahun 1993-2001 sektor ini tetap menjadi andalan (sektor basis) bagi perekonomian Kabupaten Sleman.

6. Potensi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Berdasarkan analisis *Location Quotient*, potensi sektor perdagangan di Kabupaten Sleman selama kurun waktu 1993-2001 terus mengalami peningkatan, walaupun besarnya nilai dari kenaikan nilai LQ dari tahun 1993-2001 tidak begitu besar.

Hasil perhitungan nilai LQ tahun 1993 sebesar 1,12 milyar rupiah, sedangkan pada tahun 1998 sebesar 1,15 milyar rupiah, yang berarti terjadi

peningkatan sebesar 0,03 milyar rupiah. Pada tahun 2001 nilai LQ sebesar 1,13 milyar rupiah, yang ada kenaikan sebesar 0,01 milyar rupiah dibandingkan tahun 1993. Dilihat dari hasil analisis *Location Quotient* selama tahun 1993-2001 ternyata sektor ini mempunyai nilai $LQ > 1$, yang berarti sektor ini merupakan sektor basis/andalan bagi perekonomian Kabupaten Sleman.

7. Potensi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Berdasarkan analisis *Location Quotient* selama kurun waktu analisis, sektor angkutan dan komunikasi Propinsi D.I Yogyakarta terus mengalami penurunan.

Pada tahun 1993 nilai LQ sebesar 1,00 milyar rupiah dan pada tahun 1997 nilai LQ sebesar 0,94 milyar rupiah, yang berarti terjadi penurunan sebesar 0,06 milyar rupiah. Bila kita lihat dari hasil perhitungan, nilai LQ tahun 1997 sebesar 0,94 milyar rupiah dan pada tahun 2001 sebesar 0,83 milyar rupiah, yang berarti terjadi penurunan sebesar 0,11 milyar rupiah. Selama kurun waktu analisis yaitu tahun 1993-2001, sektor pengangkutan dan komunikasi nilai $LQ < 1$, yang berarti bahwa sektor ini belum bisa menjadi andalan atau sebagai sektor basis bagi perekonomian Kabupaten Sleman.

8. Potensi Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

Berdasarkan analisis *Location Quotient*, pada tahun 1993 sampai tahun 2001 sektor keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan ini termasuk

dalam kategori sektor basis karena nilai $LQ > 1$, walaupun dari tahun ketahun sangat fluktuatif.

Hasil perhitungan pada tahun 1993 nilai LQ sebesar 1,18 milyar rupiah, pada tahun 1997 sebesar 1,10 milyar rupiah yang berarti terjadi penurunan sebesar 0,08 milyar rupiah. Tetapi pada tahun 2001 nilai LQ sebesar 1,11 milyar rupiah yang berarti terjadi penurunan sebesar 0,07 milyar rupiah dibandingkan pada tahun 1993.

9. Potensi Sektor Jasa-jasa

Berdasarkan analisis *Location Quotient*, pada tahun 1993 sampai tahun 2001 sektor jasa-jasa merupakan sektor yang memiliki LQ yang kecil sehingga sektor ini belum bisa dijadikan sebagai sektor basis.

Hasil perhitungan selama kurun waktu analisis (1993-2001), pada tahun 1993 nilai LQ sebesar 0,84 milyar rupiah, sedangkan pada tahun 1996 nilai LQ sebesar 0,86 milyar rupiah yang berarti terjadi kenaikan sebesar 0,02 milyar rupiah sedangkan pada tahun 2001 nilai LQ sebesar 0,86 milyar rupiah, yang berarti terjadi peningkatan sebesar 0,02 milyar rupiah. Nilai LQ tetap berada di bawah angka 1 atau $LQ < 1$ yang berarti bahwa sektor jasa-jasa belum bisa dijadikan sektor andalan atau sebagai sektor basis bagi perekonomian di Kabupaten Sleman.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Menurut uraian informasi data serta hasil analisis *Shift Share* dan analisis *Location Quotient* pada sektor-sektor ekonomi Kabupaten Sleman, maka dapat disimpulkan hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis Shift Share tahun 1993-2001 menunjukkan bahwa total tingkat laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Kabupaten Sleman adalah positif. Demikian juga dilihat dari pengaruh komponen pertumbuhan nasional (D.I Yogyakarta), pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Kabupaten Sleman menunjukkan nilai yang positif, artinya kontribusi sektor-sektor ekonomi Kabupaten Sleman pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan kontribusi sektor-sektor ekonomi secara nasional (D.I Yogyakarta).
 - a. Dilihat dari pengaruh komponen bauran Industri (Mij) menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian, sektor pertambangan dan galian, sektor bangunan, dan sektor jasa-jasa mempunyai nilai yang negatif, hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor-sektor tersebut lebih lambat pertumbuhan dibandingkan sektor-sektor lainnya. Sedangkan sektor-sektor lainnya yaitu sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air minum, perdagangan hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, keuangan,

- persewaan dan jasa perusahaan menunjukkan nilai yang positif yang berarti bahwa kontribusi sektor-sektor tersebut lebih cepat pertumbuhan.
- b. Selanjutnya bila dilihat dari komponen keunggulan kompetitif (Cij), sektor pertanian, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan, jasa perusahaan dan jasa-jasa menunjukkan nilai yang negatif yang berarti bahwa kontribusi sektor tersebut pertumbuhannya lebih lambat dari sektor-sektor lainnya. Sedangkan pada komponen Cij yang menunjukkan nilai positif hanya sektor pertambangan dan penggalian yang berarti bahwa kontribusi sektor tersebut pertumbuhannya lebih cepat.
- c. Bila dilihat dari komponen pertumbuhan regional secara keseluruhan (Dij), tingkat pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi Kabupaten Sleman menunjukkan nilai yang positif. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan PDRB Kabupaten Sleman disusul secara berurutan oleh sektor industri pengolahan, sektor jasa-jasa sektor pertanian, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor bangunan, sektor

listrik, gas dan air minum, dan yang terakhir yaitu sektor pertambangan dan penggalian.

2. Berdasarkan analisis potensi yang dimiliki daerah, dengan menggunakan alat analisis *Location Quotient* terhadap sembilan sektor ekonomi di Kabupaten Sleman, dapat disimpulkan bahwa sektor potensial (sektor basis) yang dapat diandalkan dalam pertumbuhan PDRB Kabupaten Sleman selama kurun waktu tahun 1993-2001 didominasi oleh sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor keuangan, persewaan, jasa perusahaan. Disamping itu juga ada satu sektor yang cukup berpotensi dan pernah menjadi sektor basis perekonomian Kabupaten Sleman selama beberapa tahun yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sedangkan untuk sektor pertanian, sektor pertambangan dan galian, sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor listrik, gas dan air minum, sektor keuangan, persewaan, jasa perusahaan belum pernah termasuk dalam kategori sektor basis (sektor andalan) selama kurun waktu tahun 1993-2001.
3. Selama periode analisis yaitu tahun 1993-2001, dilihat dari analisis *Shift Share* dan analisis *Location Quotient* tidak tampak adanya perubahan struktur dalam perekonomian Kabupaten Sleman. Sektor perdagangan, hotel dan restoran masih merupakan sektor andalan dan memiliki potensi serta kontribusi terbesar bagi pembentukan PDRB Kabupaten Sleman.

4. Jika dilihat dari kontribusi kelompok sektor, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi kelompok sektor tertier paling besar peranannya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sleman. Tapi meskipun kontribusinya cukup besar tapi arah pertumbuhannya cenderung mengalami penurunan. Begitu pula untuk kelompok sektor primer pertumbuhannya terus mengalami penurunan. Sedangkan kelompok sektor sekunder terus mengalami kenaikan pertumbuhan setiap tahunnya.

6.2. Implikasi Kebijakan

Kebijakan ekonomi regional biasanya bertujuan untuk menghilangkan atau setidaknya berusaha untuk mengurangi perbedaan pertumbuhan ekonomi antar daerah yang pertumbuhannya lambat, serta mengupayakan agar daerah yang masih terbelakang dapat mengejar ketertinggalannya. Beberapa kebijakan yang dapat diterapkan serta mencapai sasaran tersebut di atas adalah:

- Menempatkan sektor-sektor ekonomi pada proporsi yang sebenarnya atau sesuai dengan kemampuan sumber daya yang ada, kemampuan fisik dan sosial ekonomi dari wilayah tersebut, terutama sektor basis agar bekerja sesuai dengan mekanisme pasar.
- Menempatkan pelaksanaan orientasi pembangunan berdasarkan pada potensi dan kondisi daerah setempat dengan mengikut sertakan pelaku-pelaku ekonomi lokal yang potensial dan berkualitas.

- Memberikan insentif yang memadai terhadap sektor-sektor ekonomi tertentu yang punya potensi besar untuk tumbuh dan berkembang dimasa mendatang, seperti sektor angkutan dan komunikasi dan sektor jasa-jasa.
- Agar pembangunan regional mampu memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat, maka dalam pengelolaan sumber daya tersebut hendaknya mempertimbangkan aspek ekonomi lingkungan yang berimbang untuk mempertahankan kelestarian sumber dayanya.
- Lebih memantapkan lagi program keterkaitan antar sektor ekonomi baik itu sektor basis maupun sektor non basis, sehingga pertumbuhan semua sektor dapat tumbuh dan berkembang minimal setara dengan pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor ekonomi secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln, 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama, Yogyakarta, Penerbit BPFE.
- Baiq Saripta WM (95.213.063), 2000, Dalam Skripsinya yang Berjudul: *Dampak Pengembangan Usaha Tani Rumput Laut Terhadap Pendapatan dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat*.
- Biro Pusat Statistik Kabupaten Sleman dan BAPPEDA DIY, 1999, *Indikator Ekonomi Kabupaten Sleman, Sleman Dalam Angka 1993-2001*
- Glasson, John, 1990, *Pengantar Perencanaan Regional*, (Penerjemah P. Sitohang), Jakarta: FE UI.
- Hermanto, 2000, *Analisis Spesialisasi Regional Propinsi Kalimantan Tengah*, Jurnal. Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume I No. I / 2000 UMY, hal 45-72, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajat, 1997, *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPP- AMP YKPN.
- Kuncoro, Mudrajat, Samsubar Saleh, dan Lincoln Arsyad, (1994), *Desentralisasi Fiskal: Tinjauan dan Implikasinya bagi Repelita IV*, Laporan Penelitian DPP/SPP, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 1994.
- Richardson HW, 1991, *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional* (Penerjemah P. Sitohang) Jakarta: FE UI.
- Soeratno dan Arsyad, Lincoln, 1993, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Sujamto, *Proses Pembuatan UU No.5 Tahun 1974*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985.
- Sumitro, *Desentralisasi Dalam Pelaksanaan Manajemen Pembangunan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Siti Fatimah Nurhayati, 1997, *Analisis Penentuan Spesialisasi Sektor Ekonomi Di Kabupaten Boyolali Dalam Menghadapi Implementasi Otonomi Daerah Masa Krisis Ekonomi 1997-1999*, FE Universitas Muhammadiyah Surakarta.

LAMPIRAN

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993-2001
Tahun Dasar 1993 (Jutaan rupiah)

LAPANGAN USAHA	TAHUN								
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pertanian	699,851	716,889	747,526	795,211	822,446	865,395	817,810	901,380	886,990
Pertambangan & Penggalian	59,270	64,045	67,714	69,960	71,548	60,251	60,476	60,555	60,917
Industri & Pengolahan	511,439	601,917	635,002	664,724	701,976	659,816	682,440	664,115	677,486
Litrik, Gas, dan Air Bersih	24,219	28,327	30,607	28,896	31,374	31,429	35,344	38,128	39,004
Bangunan	422,300	451,468	493,891	532,827	552,853	371,345	383,269	400,859	412,355
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	623,561	676,167	733,368	797,939	828,299	741,795	761,008	791,621	846,634
Pengangkutan dan Komunikasi	467,263	502,371	538,537	575,293	593,459	541,280	552,812	609,593	672,922
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	415,609	444,862	499,920	544,356	567,462	527,472	531,007	524,512	543,471
Jasa – Jasa	834,516	901,028	995,338	1067,143	1116,950	977,631	1000,279	1026,947	1042,761
Produk Domestik Regional Bruto (Rp)	4,058.028	4,387.074	4,741.903	5,106.349	5,286.367	4,685.777	4,824.446	5,017.709	5,182.544

Sumber : BPS Yogyakarta

Tabel 1.2
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sleman
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993-2001
Tahun Dasar 1993 (Jutaan Rupiah)

LAPANGAN USAHA	TAHUN								
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pertanian	197,505	213,042	231,278	218,908	227,124	181,342	187,815	205,817	212,155
Pertambangan & Penggalian	5,997	6,473	7,138	7,420	7,198	5,866	6,059	6,337	6,583
Industri & Pengolahan	197,064	219,249	223,786	234,823	231,832	220,433	233,125	234,455	247,103
Litrik, Gas, dan Air Bersih	7,562	8,114	7,950	7,604	7,918	9,748	9,902	10,360	10,562
Bangunan	168,053	157,255	177,165	173,869	180,772	144,138	147,482	150,620	154,596
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	247,907	253,310	245,924	234,723	250,567	250,382	255,535	266,111	279,591
Pengangkutan dan Komunikasi	167,061	163,287	151,673	149,663	158,272	150,438	151,753	156,013	162,129
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	174,268	165,830	170,357	172,883	177,540	173,300	175,675	168,151	175,393
Jasa - Jasa	250,634	263,127	2224,820	246,317	256,107	242,442	247,312	253,308	261,721
Produk Domestik Regional Bruto	1,416.051	1,449.687	1,440.091	1,446.210	1,497.330	1,378.089	1,404.658	1,451.772	1,509.833

Sumber : BPS Yogyakarta

Analisis *Location Quotient* (LQ)

Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk menganalisis ada tidaknya spesialisasi suatu daerah untuk industri (sektor). Formula LQ adalah sebagai berikut (Hermanto, 2000):

$$LQ = \frac{E_{ij}/E_j}{E_{in}/E_n}$$

Keterangan

E_{ij} = kesempatan kerja di sektor i di daerah j

E_j = kesempatan kerja di daerah j

E_{in} = kesempatan kerja di sektor i di tingkat regional

E_n = kesempatan kerja di tingkat regional

Interpretasi dari hasil perhitungan dengan formula tersebut adalah:

- Apabila nilai $LQ > 1$ wilayah j untuk industri i ada spesialisasi (tingkat spesialisasi daerah lebih besar daripada spesialisasi di tingkat regional)
- Apabila nilai $LQ = 1$ maka tingkat spesialisasi daerah sama dengan spesialisasi tingkat regional
- Apabila nilai $LQ < 1$ maka tidak ada spesialisasi (tingkat spesialisasi daerah lebih kecil daripada spesialisasi di tingkat regional)

Lampiran I

Perhitungan Analisis Shift Share Sektor Ekonomi Kabupaten Sleman Tahun 1993-2001 Berdasarkan Tabel 1.1 Dan Tabel 1.2

$$\begin{aligned}r_{ij} &= \frac{Y_{ij}^* - Y_{ij}}{Y_{ij}} \\ &= \frac{212,155 - 197,505}{197,505} \\ &= 0,074175337\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}r_{in} &= \frac{Y_{in}^* - Y_{in}}{Y_{in}} \\ &= \frac{886,990 - 699,851}{699,851} \\ &= 0,267398346\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}r_n &= \frac{Y_n^* - Y_n}{Y_n} \\ &= \frac{5,182,544 - 4,058,028}{4,058,028} \\ &= 0,277108734\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}N_{ij} &= Y_{ij} - r_n \\ &= 197,505 - 0,27710898 \\ &= 197,504,7229\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}M_{ij} &= Y_{ij} (r_{in} - r_n) \\ &= 197,505 (0,267398346 - 0,27710898) \\ &= -1,917,8501\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}C_{ij} &= Y_{ij} (r_{ij} - r_n) \\ &= 197,505 (0,074175337 - 0,267398346) \\ &= -38,162,5104\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}D_{ij} &= N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} \\ &= 197,227891 + (-1,917,89876) + (-38,1625103) \\ &= 157,424,3625\end{aligned}$$

Lampiran II
Perhitungan LQ

Berdasarkan Tabel 1.1 Dan Tabel 1.2 Tahun 1993-2001

Pertanian (I)

$\text{LQ 93} = \frac{197,505/1,416051}{699,851/4,058028}$ $= \frac{139,759087}{172,4608603}$ $= 0,79$	$\text{LQ 98} = \frac{181,342/1,378089}{865,395/4,685777}$ $= \frac{131,5894692}{184,6854855}$ $= 0,80$
$\text{LQ 94} = \frac{213,042/1,449687}{716,889/4,387074}$ $= \frac{146,9572397}{163,4093703}$ $= 0,90$	$\text{LQ 99} = \frac{187,815/1,404658}{817,810/4,824446}$ $= \frac{0,133708}{0,169513}$ $= 0,79$
$\text{LQ 95} = \frac{231,278/1,440091}{747526/4,741903}$ $= \frac{160,5995732}{157.6426173}$ $= 1,01$	$\text{LQ 00} = \frac{205,817/1,451772}{901,380/5,017709}$ $= \frac{0,141769}{0,179639}$ $= 0,79$
$\text{LQ 96} = \frac{218,908/1,446210}{795,211/5,106349}$ $= \frac{151,3666757}{155,7298571}$ $= 1,02$	$\text{LQ 01} = \frac{212,155/1,509833}{886,990/5,182544}$ $= \frac{0,140515}{0,171149}$ $= 0,82$
$\text{LQ 97} = \frac{227,124/1,497330}{822,446/5,286367}$ $= \frac{151,6860011}{155,57868}$ $= 0,97$	

Lampiran III
Perhitungan LQ

Berdasarkan Tabel 1.1 Dan Tabel 1.2 Tahun 1993-2001

Pertambahan dan Penggalian (2)

<p>93 = $\frac{5,997/1,416051}{59,270/4,058028}$</p> <p>= $\frac{4,235016959}{14,605661632}$</p> <p>= 0,28</p>	<p>98 = $\frac{5,866/1,378089}{60,251/4,685777}$</p> <p>= $\frac{4,25661913}{12,85827302}$</p> <p>= 0,33</p>
<p>94 = $\frac{6,473/1,449687}{64,045/4,387074}$</p> <p>= $\frac{4,465101777}{14,598565843}$</p> <p>= 0,31</p>	<p>99 = $\frac{6,059/1,404658}{60,476/4,824446}$</p> <p>= $\frac{4,313505494}{12,5353253}$</p> <p>= 0,34</p>
<p>95 = $\frac{7,138/1,440091}{67,714/4,741903}$</p> <p>= $\frac{5,081623314}{14,27992095}$</p> <p>= 0,35</p>	<p>00 = $\frac{6,337/1,451772}{60,555/5,017709}$</p> <p>= $\frac{4,365010484}{12,06825665}$</p> <p>= 0,36</p>
<p>96 = $\frac{7,420/1,446210}{69,960/5,106349}$</p> <p>= $\frac{5,130651842}{13,70059117}$</p> <p>= 0,39</p>	<p>01 = $\frac{6,583/1,509833}{60,917/5,182544}$</p> <p>= $\frac{4,360084857}{11,75426586}$</p> <p>= 0,37</p>
<p>97 = $\frac{7,198/1,497330}{71,548/5,286367}$</p> <p>= $\frac{4,807223525}{13,53443679}$</p> <p>= 0,36</p>	

Lampiran IV
Perhitungan LQ

Berdasarkan Tabel 1.1 Dan Tabel 1.2 Tahun 1993-2001

Industri Pengolahan (3)

<p>93 = $\frac{197,064/1,416051}{511,439/4,058028}$</p> <p>= $\frac{139,1644792}{126,0314123}$</p> <p>= 1,08</p>	<p>98 = $\frac{5,866/1,378089}{60,251/4,685777}$</p> <p>= $\frac{159,955617}{140,8125056}$</p> <p>= 1,14</p>
<p>94 = $\frac{219,249/1,449687}{601,917/4,387074}$</p> <p>= $\frac{0,151238853}{137,2023814}$</p> <p>= 1,10</p>	<p>99 = $\frac{233,125/1,404658}{682,440/4,824446}$</p> <p>= $\frac{165,9656657}{141,4545836}$</p> <p>= 1,12</p>
<p>95 = $\frac{223,786/1,440091}{635,002/4,741903}$</p> <p>= $\frac{155,3971242}{133,9129885}$</p> <p>= 1,16</p>	<p>00 = $\frac{234,455/1,451772}{664,115/5,017709}$</p> <p>= $\frac{16,4957445}{132,3542278}$</p> <p>= 1,122</p>
<p>96 = $\frac{234,823/1,446210}{694,724/5,106349}$</p> <p>= $\frac{162,3713013}{136,051022}$</p> <p>= 0,90</p>	<p>01 = $\frac{247,103/1,509833}{677,486/5,182544}$</p> <p>= $\frac{163,6624713}{130,7246017}$</p> <p>= 1,25</p>
<p>97 = $\frac{231,832/1,497330}{701,976/5,286367}$</p> <p>= $\frac{154,8302645}{132,7898725}$</p> <p>= 1,17</p>	

Lampiran V
Perhitungan LQ

Berdasarkan Tabel 1.1 Dan Tabel 1.2 Tahun 1993-2001

Listrik, Gas, dan Air Bersih (4)

<p>93 = $\frac{7,562/1,416051}{24,219/4,058028}$</p> <p>= $\frac{5,340203142}{5,968169761}$</p> <p>= 0,88</p>	<p>98 = $\frac{9,748/1,378089}{31,429/4,685777}$</p> <p>= $\frac{7,073563464}{6,707318765}$</p> <p>= 1,05</p>
<p>94 = $\frac{8,114/1,449687}{28,327/4,387074}$</p> <p>= $\frac{5,597070264}{6,456923225}$</p> <p>= 0,87</p>	<p>99 = $\frac{9,902/1,404558}{35,344/4,824446}$</p> <p>= $\frac{7,049402773}{7,326022511}$</p> <p>= 0,96</p>
<p>95 = $\frac{7,950/1,440091}{30,607/4,741903}$</p> <p>= $\frac{5,520484469}{6,454581631}$</p> <p>= 0,85</p>	<p>00 = $\frac{10,360/1,451772}{38,128/5,017709}$</p> <p>= $\frac{7,136106772}{7,59868697}$</p> <p>= 0,94</p>
<p>96 = $\frac{7,604/1,446210}{28,896/5,106349}$</p> <p>= $\frac{5,257880944}{5,658837655}$</p> <p>= 0,98</p>	<p>01 = $\frac{10,562/1,509833}{39,004/5,182544}$</p> <p>= $\frac{6,995475659}{7,526033546}$</p> <p>= 0,93</p>
<p>97 = $\frac{7,918/1,497330}{31,374/5,286367}$</p> <p>= $\frac{5,288079448}{5,934888743}$</p> <p>= 0,89</p>	

Lampiran VI
Perhitungan LQ

Berdasarkan Tabel 1.1 Dan Tabel 1.2 Tahun 1993-2001

Bangunan (5)

<p>93 = $\frac{168,053/1,416051}{422,300/4,058028}$</p> <p>= $\frac{118,6772228}{104,0653243}$</p> <p>= 1,12</p>	<p>98 = $\frac{144,138/1,378089}{371,345/4,685777}$</p> <p>= $\frac{104,5926642}{79,24939663}$</p> <p>= 1,32</p>
<p>94 = $\frac{157,255/1,449687}{451,468/4,387074}$</p> <p>= $\frac{108,4751398}{102,9086813}$</p> <p>= 1,06</p>	<p>99 = $\frac{147,482/1,404658}{383,269/4,824446}$</p> <p>= $\frac{104,9949525}{79,44311119}$</p> <p>= 1,32</p>
<p>95 = $\frac{177,165/1,440091}{493,891/4,741903}$</p> <p>= $\frac{123,0234756}{104,1545978}$</p> <p>= 1,18</p>	<p>00 = $\frac{150,620/1,451772}{400,859/5,017709}$</p> <p>= $\frac{103,7490735}{79,88884867}$</p> <p>= 1,30</p>
<p>96 = $\frac{173,869/1,446210}{532,827/5,106349}$</p> <p>= $\frac{120,2238956}{104,3459818}$</p> <p>= 1,21</p>	<p>01 = $\frac{154,596/1,509833}{412,355/5,182544}$</p> <p>= $\frac{102,3927812}{79,56613586}$</p> <p>= 1,29</p>
<p>97 = $\frac{180,772/1,497330}{552,853/5,286367}$</p> <p>= $\frac{120,7295653}{104,5808965}$</p> <p>= 1,15</p>	

Lampiran VII

Perhitungan LQ

Berdasarkan Tabel 1.1 Dan Tabel 1.2 Tahun 1993-2001

Perdagangan Hotel, dan Restoran (6)

93	= $\frac{247,907/1,416051}{623,561/4,058028}$	98	= $\frac{250,382/1,378089}{741,795/4,685777}$
	= $\frac{175,0692595}{153,6610886}$		= $\frac{181,68783}{158,3077897}$
	= 1,12		= 1,15
94	= $\frac{253,310/1,449687}{676,167/4,387074}$	99	= $\frac{255,535/1,404658}{761,008/4,824446}$
	= $\frac{174,7342702}{154,1271016}$		= $\frac{181,9197271}{157,7399768}$
	= 1,14		= 1,15
95	= $\frac{245,924/1,440091}{733,368/4,471903}$	00	= $\frac{266,711/1,451772}{791,621/5,017709}$
	= $\frac{170,7697639}{154,6568962}$		= $\frac{183,7141094}{157,7654264}$
	= 1,10		= 1,16
96	= $\frac{234,723/1,446210}{797,939/5,106349}$	01	= $\frac{279,591/1,509833}{846,634/5,182544}$
	= $\frac{162,3021553}{156,264094}$		= $\frac{279,591/1,509833}{846,634/5,182544}$
	= 1,09		= 1,13
97	= $\frac{150,567/1,497330}{828,299/5,286367}$		
	= $\frac{167,3425364}{156,6858676}$		
	= 1,07		

Lampiran VIII

Perhitungan LQ

Berdasarkan Tabel 1.1 Dan Tabel 1.2 Tahun 1993-2001

Pengangkutan dan Komunikasi (7)

93	$= \frac{167,061/1,416051}{467,263/4,058028}$	98	$= \frac{150,438/1,378089}{541,280/4,685777}$
	$= \frac{117,980099}{115,1453366}$		$= \frac{109,1642122}{115,5155271}$
	$= 1,00$		$= 0,95$
94	$= \frac{157,255/1,449687}{451,468/4,387074}$	99	$= \frac{151,753/1,404658}{552,812/4,824446}$
	$= \frac{112,636038}{114,5116312}$		$= \frac{104,9949525}{79,44311119}$
	$= 0,99$		$= 0,94$
95	$= \frac{151,673/1,440091}{538,537/4,741903}$	00	$= \frac{150,620/1,451772}{400,859/5,017709}$
	$= \frac{105,3218165}{113,5698052}$		$= \frac{107,4638442}{121,4883127}$
	$= 0,92$		$= 0,88$
96	$= \frac{149,663/1,446210}{575,293/5,106349}$	01	$= \frac{162,129/1,509833}{672,922/5,182544}$
	$= \frac{103,486354}{112,6622955}$		$= \frac{107,3820747}{1298439531}$
	$= 0,92$		$= 0,83$
97	$= \frac{158,272/1,497330}{593,459/5,286367}$		
	$= \frac{105,7028177}{112,2621642}$		
	$= 0,94$		

Lampiran IX
Perhitungan LQ

Berdasarkan Tabel 1.1 Dan Tabel 1.2 Tahun 1993-2001

Kenangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (8)

<p>93 = $\frac{174,268/1,416051}{415,609/4,058028}$</p> <p>= $\frac{123,066189}{102,4164939}$</p> <p>= 1,18</p>	<p>98 = $\frac{173,300/1,378089}{527,472/4,685777}$</p> <p>= $\frac{125,7538519}{112,5687373}$</p> <p>= 1,12</p>
<p>94 = $\frac{165,830/1,449687}{444,862/4,387074}$</p> <p>= $\frac{114,3902097}{101,4028944}$</p> <p>= 1,13</p>	<p>99 = $\frac{175,675/1,404658}{531,007/4,824446}$</p> <p>= $\frac{125,8246612}{110,0659019}$</p> <p>= 1,14</p>
<p>95 = $\frac{170,357/1,440091}{499,920/4,741903}$</p> <p>= $\frac{118,2959966}{105,4260283}$</p> <p>= 1,12</p>	<p>00 = $\frac{168,151/1,451772}{524,512/5,017709}$</p> <p>= $\frac{115,8246612}{104,5339616}$</p> <p>= 1,11</p>
<p>96 = $\frac{172,883/1,446210}{544,356/5,106349}$</p> <p>= $\frac{119,5421135}{106,6037594}$</p> <p>= 1,18</p>	<p>01 = $\frac{175,393/1,509833}{543,471/5,182544}$</p> <p>= $\frac{116,1671523}{1048656799}$</p> <p>= 1,11</p>
<p>97 = $\frac{177,540/1,497330}{567,462/5,286367}$</p> <p>= $\frac{118,5710565}{107,3444201}$</p> <p>= 1,10</p>	

Lampiran X
Perhitungan LQ

Berdasarkan Tabel 1.1 Dan Tabel 1.2 Tahun 1993-2001

Jasa-jasa (9)

<p>93 = $\frac{250,634/1,416051}{834,561/4,058028}$</p> <p>= $\frac{176,9950376}{205,6456979}$</p> <p>= 0,84</p>	<p>98 = $\frac{242,442/1,378089}{977,631/4,685777}$</p> <p>= $\frac{175,9262283}{208,637998}$</p> <p>= 0,84</p>
<p>94 = $\frac{263,127/1,449687}{901,028/4,387074}$</p> <p>= $\frac{181,5060768}{205,3824485}$</p> <p>= 0,89</p>	<p>99 = $\frac{247,312/1,404658}{1000,279/4,824446}$</p> <p>= $\frac{176,0656331}{207,3355158}$</p> <p>= 0,85</p>
<p>95 = $\frac{2224,820/1,440091}{995,338/4,741903}$</p> <p>= $\frac{1554,916259}{209,9131931}$</p> <p>= 0,74</p>	<p>00 = $\frac{253,308/1,451772}{1026,947/5,017709}$</p> <p>= $\frac{174,4819434}{204,6612154}$</p> <p>= 0,85</p>
<p>96 = $\frac{246,317/1,446210}{1067,143/5,106349}$</p> <p>= $\frac{170,3567971}{208,9835614}$</p> <p>= 0,86</p>	<p>01 = $\frac{261,721/1,509833}{1042,764/5,182544}$</p> <p>= $\frac{173,3443368}{201,2069748}$</p> <p>= 0,86</p>
<p>97 = $\frac{256,107/1,497330}{1116,950/5,286367}$</p> <p>= $\frac{171,0424556}{211,2887736}$</p> <p>= 0,81</p>	